****

**TESIS**

**ANALISIS HUBUNGAN HUKUM UTANG PIUTANG YANG TIDAK DIDASARI PERJANJIAN TERTULIS DALAM PRAKTEK**

Disusun untuk memenuhi syarat Penulisan Tesis

di Magister Ilmu Hukum

**Oleh**

**ADI PURNAMA**

**NPM. 7223800032**

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2025

**PERSETUJUAN PEMBIMBING PROPOSAL TESIS**

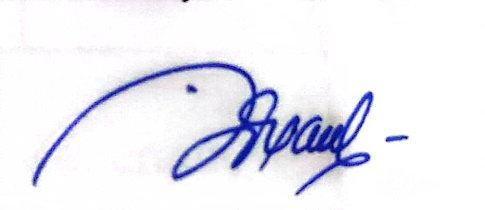
Proposal Tesis dengan judul “Analisis Hubungan Hukum Utang Piutang Yang Tidak Didasari Perjanjian Tertulis Dalam Praktek”

Nama : Adi Purnama

NPM : 7223800032

Program Studi : Magister Hukum

Telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian tesis.

Pembimbing I Pembimbing II



**Dr. Sanusi, S.H.,M.H Dr.Soesi Idayanti.S.H.,M.H**

NIDN. 0609086202 NIDN.06270864

Mengetahui

Ketua Program Studi



**Dr. Sanusi S.H.,M.H**

NIDN.0609086202.

# **PENGESAHAN UJIAN TESIS**

Tesis dengan Judul **“**Analisis Hubungan Hukum Utang Piutang Yang Tidak Didasari Perjanjian Tertulis Dalam Praktek**”** Karya,

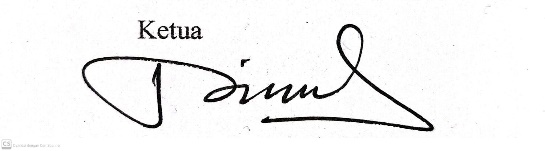
Nama : **Adi Purnama**

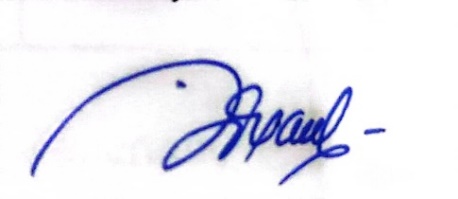
NPM : 7222800032

Progam Studi : Magister Ilmu Hukum

Telah dipertahankan dalam sidang panitia ujian tesis Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal pada hari Kamis Tanggal 23 Januari 2025.

Tegal, 23 Januari 2025

**Panitia Ujian**

 **Ketua Penguji Sekretaris**

**Dr. Taufiqullah, M.Hum. Dr. Tity Kusrina, M.Pd.**

**NIDN 0615087802 NIDN 0630086401**

 **Penguji Utama Penguji I**

****

**Dr. Nuridin, S.H., M.H. Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.**

**NIDN 0610116002 NIDN 0606066001**

**Penguji II**



**Dr. Sanusi, S.H., M.H.**

**NIDN 0609086202**

 **Direktur Pascasarjana Ketua Program Studi**



**Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. Dr. Sanusi, S.H., M.H.**

**NIDN 0606066001 NIDN 0609086202**

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Purnama

NPM : 7223800032

Jenjang : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Bila ternyata dikemudian hari diketahui ada yang tidak sesuai, maka saya siap menanggung akibatnya.

Tegal, 30 Januari 2025

 Yang menyatakan,

Adi Purnama

**ABSTRAK**

Hubungan utang piutang yang tidak didasari perjanjian tertulis merupakan fenomena yang umum terjadi dalam transaksi keuangan di masyarakat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum hubungan utang piutang tanpa dokumen tertulis, tantangan pembuktiannya, serta implikasinya dalam praktik peradilan. Berdasarkan kajian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan praktik peradilan, hubungan utang piutang tanpa perjanjian tertulis tetap sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber data bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (literatur hukum), dan tersier (kamus hukum). Metode Pengumpulan Data melalui studi pustaka dengan menganalisis kasus-kasus penipuan cinta di seluruh Indonesia dari tahun 2000 hingga 2024 di media online. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk mengevaluasi regulasi yang ada dan relevansinya terhadap kasus utang piutang tanpa perjanjian tertulis.

Hasil penelitian dalam penyelesaian sengketa, pihak yang berkepentingan menghadapi kendala pembuktian karena ketiadaan dokumen yang eksplisit mengenai kesepakatan. Pembuktian dalam perkara ini bergantung pada alat bukti lain, seperti saksi, bukti transaksi, atau komunikasi antara para pihak. Studi ini menyarankan agar setiap transaksi utang piutang sebaiknya dituangkan dalam bentuk tertulis guna menghindari risiko hukum di kemudian hari. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan literasi hukum masyarakat terkait pentingnya perjanjian tertulis serta menyediakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif.

**Kata Kunci:** *hubungan utang piutang, perjanjian tidak tertulis, pembuktian.*

**ABSTRACT**

Debt relationships that are not based on written agreements are a common phenomenon in financial transactions in society. This study aims to analyze the legal force of debt relationships without written documents, the challenges of proving them, and their implications in judicial practice. Based on a study of the Civil Code (KUH Perdata) and judicial practice, debt relationships without written agreements remain valid as long as they meet the requirements for a valid agreement as regulated in Article 1320 of the Civil Code.

This study uses a normative legal method with primary legal data sources (statutory regulations), secondary (legal literature), and tertiary (legal dictionary). Data Collection Method through literature study by analyzing cases of love fraud throughout Indonesia from 2000 to 2024 in online media. Data analysis uses a descriptive analytical approach to evaluate existing regulations and their relevance to cases of debt without written agreements.

The results of the study in dispute resolution, interested parties face obstacles in proving due to the absence of explicit documents regarding the agreement. Proof in this case relies on other evidence, such as witnesses, transaction evidence, or communication between the parties. This study suggests that every debt transaction should be stated in written form to avoid legal risks in the future. In addition, the government needs to improve public legal literacy regarding the importance of written agreements and provide alternative mechanisms for more effective dispute resolution.

Keywords: *debt relationship, unwritten agreement, proof.*

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik yang berjudul’ Analisis hubungan hukum utang piutang yang tidak didasari perjanjian tertulis dalam praktek”.Penyusunan Tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. Fajar Ari Sadewo, SH.,MH selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Pancasakti Tegal,
3. Dr. Sanusi, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Muhammad Wildan, SH.,MH selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Dr. Sanusi, SH.,MH (Dosen Pembimbing I), dan Dr. Soesi Idayanti, SH,.MH (Dosen Pembimbing II) yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
6. Segenap Dosen Magister Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 2. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT, sebagai amal shalih.
7. Segenap staff administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Magister Hukum yang telah memberikah layanan akademik dengan sabar dan ramah.
8. Orang tua, serta teman-teman penulis yang memberikan dorongan moril pada penulis dalam menempuh studi, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam penyusunan Tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca umumnya.

Tegal, 30 Januari 2025

Penulis

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

PERNYATAAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

PERSEMBAHANv ii

MOTTO viii

KATA PENGANTAR ix

DAFRAR ISI vi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP x

BAB I. PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang Masalah 1
2. Rumusan Masalah 8
3. Tujuan Penelitian 9
4. Manfaat Penelitian 9
5. Originalitas Penelitian 10
6. Kerangka Konseptual 14
7. Kerangka Teori 16

BAB II. TINJAUAN KONSEPTUAL 29

1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 29
2. Jenis-Jenis Perjanjian 36
3. Asas-asas Perjanjian 40
4. Syarat Sahnya Perjanjian 49
5. Berlakunya Perjanjian 53
6. Berakhirnya Perjanjian 58
7. Landasan Teori 64
8. Teori Perjanjian 66
9. Teori Pembuktian 76

BAB III METODE PENELITIAN 87

1. Jenis Penelitian 87
2. Pendekatan Penelitian 87
3. Sumber Data 89
4. Metode Pengumpulan Data 91
5. Metode Analisis data 92

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 93

1. Analisis hukum perjanjian terhadap hubungan utag piutang

yang tidak didasari perjanjian tertulis dalam praktek 93

1. Faktor-faktor terjadinya perjanjian tidak tertulis 93
2. Aspek Positip Perjanjian Tidak Tertulis 99
3. Kendala-kendala dalam pembuktian utang piutang yang

tidak didasari perjanjian tertulis dalam praktek 103

1. Kendala dalam pembuktian perjanjian utang piutang tanpa perjanjian tertulis 107
2. Langkah mengatasi kendala dalam pembuktian utang

piutang tanpa perjanjian tertulis 110

BAB V. PENUTUP 113

1. Simpulan 113
2. Saran 114

BAB VI DAFTAR PUSTAKA 115

**BAB I**

**PENDAHLUAN**

1. **Latar Belakang Masalah.**

Transaksi keuangan dalam bentuk hubungan utang piutang kerap berlangsung di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari perorangan hingga kelembagaan. Pada kenyataannya, pelaksanaan hubungan hukum utang piutang banyak dilakukan tanpa didasari oleh perjanjian tertulis dalam praktek sehari-hari. Meskipun dalam beberapa kasus, pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan utang piutang hanya mengandalkan kesepakatan lisan atau tindakan yang secara tidak langsung mengindikasikan adanya perjanjian, hubungan ini tetap diatur oleh hukum. Pada kenyataannya, hubungan utang piutang semacam ini masih memiliki kekuatan hukum yang mengikat, meskipun tidak ada perjanjian tertulis yang menjadi bukti formal kesepakatan antara kedua belah pihak.(Sudikno Mertokusum ,2009;18)

Berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia, walaupun kesepakatan hubungan utang piutang dianjurkan menggunakan bentuk tertulis guna mempermudah pembuktian saat timbul perselisihan, namun transaksi yang tidak didasari dokumen resmi melainkan hanya berupa persetujuan verbal maupun tindakan-tindakan spesifik masih memperoleh pengakuan serta perlindungan dalam KUHPerdata. Sebagaimana disampaikan Subekti (2010:5), keabsahan sebuah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, baik yang terdokumentasi maupun verbal, wajib memenuhi empat ketentuan pokok yang mencakup persetujuan kedua belah pihak, kemampuan bertindak secara hukum, keberadaan objek yang spesifik, serta tujuan yang dibenarkan. Oleh karenanya, sekalipun tanpa adanya perjanjian tertulis, setiap kesepakatan lisan yang telah memenuhi persyaratan tersebut akan tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam praktik hukum perdata, perjanjian utang piutang seringkali tidak selalu dituangkan dalam bentuk tertulis. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, diantaranya :

1. Ketidakpahaman terhadap pentingnya perjanjian tertulis;
2. Kepercayaan pribadi antara pihak-pihak yang terlibat;
3. Kebutuhan urgensi yang mendesa;
4. Transaksi yang dilakukan biasanya dalam jumlah kecil

Suatu perjanjian tanpa bentuk tertulis masih memperoleh pengakuan secara hukum, dengan ketentuan bahwa seluruh syarat keabsahan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terpenuhi. Berkenaan dengan kesepakatan utang piutang, ketentuan dalam Pasal 1754 KUHPerdata memberikan peluang pelaksanaan baik melalui dokumentasi tertulis maupun kesepakatan secara lisan. Sistem hukum di Indonesia memberikan legitimasi terhadap kesepakatan utang piutang yang tidak didasari perjanjian tertulis, sepanjang memenuhi ketentuan keabsahan yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Adapun empat komponen wajib untuk keabsahan suatu perjanjian mencakup persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat, kemampuan hukum dari setiap pihak, keberadaan objek yang spesifik, serta landasan yang dibenarkan secara hukum.

Ketentuan yang termuat dalam pasal tersebut mengatur keluwesan mengenai format perjanjian utang piutang, dimana kesepakatan bisa dilangsungkan melalui pernyataan lisan ataupun perjanjian tertulis, sebagaimana disampaikan Soedikno (2009:5) bahwa hukum Indonesia memandang sah suatu perjanjian utang piutang walau tidak didasari dokumen tertulis. Berdasarkan aturan yang tercantum dalam Pasal 1754 KUHPerdata, kesepakatan dalam hubungan utang piutang tidak mengharuskan adanya perjanjian tertulis, meskipun demikian ketersediaan dokumen tertulis akan menguatkan kedudukan pihak yang menyatakan keberadaan perjanjian saat terjadi perselisihan hukum.

Ketentuan dalam Pasal 1754 KUHPerdata memiliki nilai strategis sebab mengakui keberadaan perjanjian utang piutang yang disampaikan melalui lisan, dimana walaupun tidak didasari perjanjian tertulis masih bisa berlaku secara legal menurut hukum. Namun dalam praktek, kesepakatan semacam ini mengalami hambatan ketika sampai pada tahap pembuktian. Ketiadaan berkas tertulis mengakibatkan pihak penuntut yang menyatakan keberadaan perjanjian mengalami kendala saat menunjukkan substansi kesepakatan tersebut dalam persidangan. Dengan demikian, sekalipun hukum mengesahkan hubungan yang tidak didasari perjanjian tertulis, aspek pembuktian menjadi faktor penentu dalam menetapkan validitas kesepakatan tersebut secara legal, sebagaimana diungkapkan Koesnoe (2015:15). Dengan demikian, meskipun Pasal 1754 KUHPerdata memberikan fleksibilitas terkait bentuk perjanjian utang piutang, penting bagi pihak-pihak yang terlibat untuk memahami konsekuensi hukum dari tidak adanya perjanjian tertulis, khususnya dalam hal pembuktian jika terjadi sengketa.

Hubungan utang piutang memang tidak selalu diikuti dengan adanya sebuah perjanjian tertulis, apalagi jika utang piutang dilakukan oleh para pihak yang memiliki kedekatan emosional yang cukup tinggi, seperti keluarga, saudara, maupun teman baik. Dalam situasi transaksi utang piutang, seringkali kesepakatan dibuat berdasarkan persetujuan lisan semata, tanpa adanya perjanjian tertulis, bahkan bukti pembayaran seperti kuitansi sering tidak diberikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dijelaskan bahwa setiap kesepakatan yang dibentuk dengan sah memperoleh kedudukan setara dengan undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut memberikan penjelasan tentang kekuatan mengikat suatu perjanjian, baik yang berbentuk tertulis maupun lisan, bagi seluruh pihak yang terkait dalam kesepakatan. Berkaitan dengan hal tersebut, kesepakatan tanpa bentuk tertulis masih mendapat pengakuan hukum selama memenuhi syarat keabsahan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Lebih jauh, Pasal 1338 KUHPerdata menghadirkan landasan yuridis yang memberikan legitimasi terhadap substansi perjanjian yang dibuat secara sah, sehingga kesepakatan utang piutang dalam bentuk apapun bersifat mengikat. Ketentuan dalam pasal tersebut menjadi pondasi pokok yang mengatur berbagai bentuk kesepakatan antar pihak dalam beragam bentuk hubungan hukum, termasuk di dalamnya hubungan utang piutang.

Disadari atau tidak, hubungan utang piutang semacam ini akan menimbulkan persoalan hukum, terutama apabila terjadi permasalahan di kemudian hari. Hubungan utang piutang tidak selalu berjalan dengan baik. Sering terjadi, permasalahan timbul akibat penerima utang tidak mampu mengembalikan utangnya sesuai dengan yang disepakati atau dijanjikan (wanprestasi). Akibatnya hak-hak pemberi utang menjadi terabaikan yang berujung pada kerugian. Persoalan ini akan menjadi rumit apabila pemberi utang tidak dapat membuktikan adanya utang piutang tersebut sesuai dengan fakta hukumnya.

Sebuah perjanjian merupakan tindakan hukum yang menimbulkan ikatan antara dua pihak atau lebih. Ketika perjanjian terbentuk, muncullah sebuah kesepakatan yang mengikat. Seiring terbentuknya kesepakatan tersebut, secara otomatis muncul berbagai hak serta kewajiban yang melekat pada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya (Iqlima, 2015: 18). Dalam pengertian yang serupa, setiap perjanjian memiliki kekuatan sebagai aturan hukum yang wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam pembentukannya. Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibentuk dengan sah memiliki kedudukan setara dengan undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.

Setiap kesepakatan dalam bentuk perjanjian memiliki fungsi utama sebagai instrumen perlindungan bagi segenap pihak yang berpartisipasi. Dokumen perjanjian berperan sebagai pembuktian formal yang mengonfirmasi keberadaan serta kebenaran suatu aktivitas yang tercantum di dalamnya. Mengingat pentingnya aspek legal, seluruh aktivitas yang mengandung unsur hak dan kewajiban perlu diwujudkan dalam format perjanjian, tidak terkecuali dalam hubungan utang piutang. Hal ini dikarenakan sebuah perjanjian yang memenuhi syarat keabsahan akan mendapatkan perlindungan secara hukum berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan regulasi hukum yang ada, keabsahan sebuah perjanjian bergantung pada terpenuhinya komponen-komponen yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang mengatur tentang:

1. Sepakat para pihak.

Setiap perjanjian membutuhkan dasar persetujuan bersama. Meski KUHPerdata belum menyediakan batasan yang jelas mengenai arti persetujuan, namun dalam pelaksanaannya, persetujuan terbentuk dari keselarasan keinginan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penawaran dan permintaan, sebagaimana diungkapkan Agus Yudha Harnoko (2011). Sebuah perjanjian menjadi tidak berlaku bila mengandung unsur pemaksaan, kecurangan, atau kekeliruan, seperti yang dikemukakan R. Soeroso (2011). Persetujuan muncul ketika terjadi keselarasan antara pihak yang menawarkan dan menerima. Pernyataan setuju bisa disampaikan baik secara eksplisit maupun implisit. Penyampaian eksplisit dapat diwujudkan melalui komunikasi verbal, dokumentasi tertulis (baik berupa akta pribadi maupun akta resmi), sedangkan cara implisit bisa ditunjukkan melalui isyarat spesifik.

Kesepakatan diam-diam (*silent agreement*) adalah kesepakatan yang disimpulkan dari sikap, tindakan atau fakta bahwa pihak tersebut memilih melaksanakan prestasi tanpa menyatakan persetujuan secara tegas, atau memilih berdiam diri ketika ia memiliki kesempatan untuk menolak.

1. Kecakapan.

Untuk membuat suatu perikatan, seorang harus memenuhi standar kecakapan seperti yang diatur dalam undang-undang. Seseorang oleh hukum dianggap cakap untuk melakukan perikatan jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum berumur 21 tahun. Sebaliknya setiap orang berumur 21 tahun keatas, yang oleh karena sesuatu sebab dia ditaruh di dalam pengampuan, maka ia dianggap tidak cakap.

Jika pihaknya merupakan badan hukum, maka standar kecakapan ini harus dinilai dari sisi kewenangan yang dimiliki oleh seseorang yang mewakili badan hukum itu dan memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum (Ghansam Anand, 2022).

1. Suatu hal tertentu.

Setiap perjanjian wajib memiliki alasan yang spesifik, dimana setiap aspek dari objek beserta kategorinya perlu dijabarkan secara mendetail dan terperinci. Objek yang dimaksud mengharuskan adanya kejelasan serta kepastian dalam penentuan karakteristiknya. Ketentuan ini mengacu pada aturan yang tercantum dalam Pasal 1332, 1333 dan 1334 KUHPerdata.

1. Suatu sebab yang halal.

Pembuatan perjanjian tidak diperkenankan mengandung unsur kepalsuan dalam dasar pembentukannya, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1335 KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata, setiap perjanjian juga tidak diperbolehkan memuat hal-hal yang berlawanan dengan peraturan perundangan yang berlaku, norma kesopanan dalam masyarakat, maupun ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan stabilitas.

Permasalahan hubungan utang piutang yang tidak didasari perjanjian tertulis muncul secara berulang akibat beragam faktor seperti tradisi masyarakat, rasa saling percaya, serta minimnya pengetahuan tentang hukum. Berdasarkan dokumentasi penyelesaian sengketa yang telah diproses melalui berbagai tingkat peradilan - mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung - mengindikasikan bahwa perselisihan dalam praktek utang piutang tanpa perjanjian tertulis kerap muncul dikarenakan tidak adanya pembuktian yang konkret terkait persetujuan kedua belah pihak. Dalam kasus seperti ini, pengadilan harus mengandalkan alat bukti lain dan pengakuan para pihak untuk menentukan kebenaran.

1. **Rumusan Masalah**

Pada kasus-kasus tertentu memang ada utang piutang yang hanya diperjanjikan secara lisan. Hal inilah yang dapat menimbulkan persoalan di kemudian hari apabila salah satu pihak ada yang melanggar janji (*wanprestasi)*, atau bahkan mengingkarinya. Berdasarkan latar belakang seperti tersebut diatas, ada dua hal yang dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah analisis hukum perjanjian terhadap hubungan utang piutang yang tidak didasari perjanjian tertulis dalam praktek ?
2. Bagaimana kendala-kendala dalam pembuktian utang piutang yang tidak didasari perjanjian tertulis dalam praktek ?
3. **Tujuan Penelitian.**

Mengacu pada permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini memiliki dua sasaran utama:

1. Untuk menganalisis hukum perjanjian terhadap hubungan utang piutang yang tidak didasari perjanjian tertulis dalam praktek ?
2. Untuk menganalisis kendala-kendala dalam pembuktian utang piutang yang tidak didasari perjanjian tertulis dalam praktek ?
3. **Manfaat Penelitian.**

Sesuai sasaran penelitian yang ingin diwujudkan, penelitian ini diproyeksikan mampu menghadirkan nilai guna bagi setiap pihak yang berurusan dengan masalah utang piutang, baik yang terlibat langsung ataupun tidak langsung. Berikut rincian kegunaan yang dimaksud:

1. Manfaat Teoritis.
2. Menyumbangkan gagasan konstruktif untuk setiap individu yang berkeinginan terjun dalam aktivitas utang piutang.
3. Menghasilkan kontribusi akademis untuk kemajuan ilmu hukum, terutama dalam ranah hukum utang piutang.
4. Berfungsi sebagai landasan dan sumber rujukan untuk penelitian-penelitian yang akan dilaksanakan di masa mendatang..
5. Manfaat Praktis.
6. Bagi Penulis.

Bagi Penulis, hasil penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman serta memberikan pengalaman nyata mengenai permasalahan utang piutang.

1. Bagi para pihak yang terlibat utang piutang.

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan pedoman bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi utang piutang untuk menghindari masalah hukum yang dapat merugikan.

1. Bagi Ilmu Pengetahuan.

Hasil penelitian ini berpotensi menyumbangkan gagasan inovatif yang dapat memperluas cakrawala pengetahuan dalam ranah hukum.

1. **Originalitas Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang berusaha menyajikan konsep, ide, maupun temuan baru yang belum pernah dieksplore secara luas oleh peneliti sebelumnya. Kebaruan dalam penelitian dibuktikan melalui pemeriksaan karya-karya ilmiah sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang dibahas, sehingga memberikan gambaran mengenai unsur pembeda, sambil memanfaatkan penelitian terdahulu sebagai referensi utama penelitian ini. Aspek kebaruan dalam sebuah penelitian memiliki nilai tinggi untuk mengembangkan wawasan masyarakat tentang suatu gejala, yang pada akhirnya mempermudah proses analisis dan penemuan solusi atas berbagai persoalan.

Berikut beberapa hasil penelitian sejenis yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sebagai bahan perbandingan.

1. Roni Ashari (2020), *Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Warung Sembako Di Desa Sidodadi, Kec. Sidomulyo, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung).*

Hasil Penelitian:

Dalam perspektif hukum Islam, selain mengikuti ketentuan syarat rukun yang sah pada transaksi utang piutang, sebuah perjanjian utang piutang perlu mematuhi prinsip-prinsip etika sebagaimana diatur dalam ketentuan utang piutang, yang mencakup:

1. Pihak pemberi pinjaman berkewajiban menyediakan jangka waktu yang memadai kepada peminjam supaya dapat melangsungkan pembayaran dengan lancar.
2. Pemberi pinjaman tidak diperkenankan melakukan penagihan sebelum masa pembayaran tiba.
3. Proses penagihan sebaiknya dilaksanakan dengan cara santun dan bermartabat.
4. Pemberi pinjaman dilarang mencari manfaat finansial dari transaksi utang, seperti penetapan bunga pinjaman.
5. Pihak pemberi pinjaman perlu
6. Memberikan penangguhan kepada orang yang sedang kesulitan.
7. Diwajibkan bagi orang yang berutang agar segera melunasi utangnya tatkala ia mampu, dan jangan menunda-nunda.
8. Berutang harus untuk tujuan yang baik.
9. Memberitahukan jika kesulitan membayar/mengembalikan utangnya.

Originalitas Penelitian :

Peneliti lebih focus pada persoalan utang piutang yang tidak diperjanjikan sesuai KUH Perdata, bukan spesifik bedaarkan Hukum Islam.

1. Puput Pujianti (2017), *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan Menggunakan Jaminan Sertifikat Tanah Orang Lain.*

Hasil Penelitian :

Sistem perlindungan hukum masih belum mencukupi bagi individu yang menyerahkan sertifikat miliknya untuk digunakan sebagai agunan pinjaman bank oleh pihak lain. Pemberian izin penggunaan sertifikat ini muncul akibat relasi personal yang erat antara pemberi dan penerima, serta minimnya wawasan mengenai aspek hukum dalam perjanjian utang piutang. Dalam penerapannya, setiap transaksi perjanjian utang piutang yang memanfaatkan jaminan dari pihak ketiga wajib disertai dengan dua bentuk kesepakatan yaitu perjanjian pokok dan perjanjian accessoir.

Originalitas Penelitian :

Ruang lingkup penelitian sebelumnya membahas tentang status hukum agunan yang terdaftar dengan identitas pihak lain sebagai penjamin utang. Sementara itu, karya ilmiah ini mengangkat permasalahan status hukum terkait hubungan utang piutang yang tidak didasari perjanjian tertulis dalam praktek. Berdasarkan pemaparan tersebut, terdapat perbedaan yang signifikan pada objek penelitian yang dianalisis.

1. Thesya Viola Sandi (2018), *Penyelesaian Utang-Piutang Tanpa Perjanjian Tertulis Dengan Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Jaminan Yang Tidak Didaftarkan.*

Hasil Penelitian :

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebuah perjanjian yang disampaikan melalui ucapan lisan masih memiliki legitimasi hukum yang mengikat. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian wajib dipatuhi dan direalisasikan oleh semua pihak yang terlibat guna menghindari timbulnya kerugian, meski hanya diucapkan secara verbal. Oleh karena itu, penggunaan sertifikat hak atas tanah yang dijadikan sebagai agunan tetap memiliki keabsahan hukum, walaupun tidak tercatat atau terdokumentasi dalam bentuk perjanjian tertulis.

Originalitas Penelitian :

Fokus penelitian tersebut adalah mempersoalkan status hukum perjanjian yang dilakukan dengan mengindahkan salah satu unsur sahnya perjanjian utang piutang terkait dengan adanya jaminan yang tidak didaftarkan. Sementara penelitian yang Penulis lakukan tidak menyinggung masalah jaminan, melainkan mengarah pada pemahaman prosedur pelaksanaan utang piutang.

1. **Kerangka Konseptual**

Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual untuk mendapatkan konstruksi logika berpikir yang terarah dalam mengidentifikasi, menganalisa dan menjelaskan berbagai variable yang terkait. Sebuah penelitian harus dilakukan dengan langkah-langkah yang sistimatis dan terarah agar dapat menghasilkan penelitian yang baik dan berbotot serta dapat dipertahankan kebenarannya.

Beberapa aspek konseptual yang relevan dalam konteks penelitian ini meliputi:

1. Utang piutang.

Utang piutang adalah hubungan hukum yang lazim dan banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya hubungan utang piutang, mulai dari adanya kebutuhan untuk modal kerja, atau kebutuhan lain yang memaksa seseorang mencari bantuan pendanaan dari pihak lain, baik perseorangan maupun melalui kelembagaan. Hubungan utang piutang tidak akan menimbulkan masalah hukum apabila kedua belah pihak dapat menyelesaikannya sesuai kesepakatan atau perjanjian yang mereka buat. Lain halnya jika salah satu pihak ada yang melanggarnya.

Utang piutang tidak selalu diikuti dengan adanya perjanjian, meskipun secara lisan terdapat kesepakatan diantara para pihak tentang tata cara utang piutang itu dilaksanakan. Dan sampai saat ini masih banyak ditemukan praktek utang piutang semacam itu yang membutuhkan perhatian hukum dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang memiliki itikad baik.

Berdasarkan ketentuan hukum Perdata, aktivitas pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian yang mengikat dua belah pihak, di mana pemberi pinjaman menyerahkan barang konsumtif kepada peminjam, dengan ketentuan bahwa penerima wajib mengembalikan barang serupa dalam jumlah dan kondisi yang setara. Konsep mengenai barang yang bersifat konsumtif ini memiliki cakupan pengertian yang meluas, sebagaimana dijelaskan dalam peraturan bahwa hal tersebut mencakup bentuk uang sebagai objek pinjaman. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep utang piutang memiliki kesepadanan makna dengan aktivitas pinjam meminjam dalam konteks hukum.

1. Perjanjian.

Dalam bahasa Belanda, kata overeenkomst menjadi asal mula penggunaan istilah perjanjian yang memiliki makna sama dengan persetujuan (Leli Joko Suryono, 2014:43). Sebuah perjanjian merupakan suatu kejadian dimana beberapa individu membuat kesepakatan untuk menjalankan aktivitas spesifik. Subekti (2004:3) mengemukakan bahwa perjanjian merupakan suatu momen ketika individu-individu mengikatkan diri dalam sebuah kesepakatan untuk mengerjakan sesuatu secara bersama. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perjanjian mengandung pengertian sebagai sebuah aktivitas yang melibatkan minimal dua individu yang bersepakat untuk menjalankan suatu kegiatan dalam ranah kepemilikan aset atau kekayaan.

Ketika dua individu membuat perjanjian, muncul sebuah keterikatan yang menciptakan hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak untuk mencapai suatu prestasi. Sebagaimana disampaikan Syahmin (2006:1), kesepakatan merupakan serangkaian ungkapan yang memuat berbagai kesanggupan, baik yang disampaikan secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Dalam konteks formal, kesepakatan yang diwujudkan dalam bentuk dokumen tertulis umumnya dikenal sebagai perjanjian.

1. Pembuktian

Dalam ranah hukum perdata, pembuktian merupakan rangkaian aktivitas yang dijalankan oleh seseorang yang mengajukan gugatan guna memperlihatkan valid atau tidaknya sebuah kejadian atau kondisi hukum spesifik. Hal ini dapat diilustrasikan pada kasus hubungan utang piutang, dimana pihak penuntut wajib menunjukkan keabsahan perjanjian tersebut, sekalipun tidak didasari perjanjian tertulis. Mengutip pandangan Sudikno Mertokusumo (2007:12) yang menyatakan bahwa dalam lingkup hukum acara perdata, pembuktian bisa dipahami sebagai serangkaian langkah yang diambil oleh pihak berperkara untuk menghadirkan bukti-bukti faktual mengenai data hukum selama persidangan berlangsung. Keberadaan pembuktian memegang peranan krusial dalam proses penentuan layak tidaknya suatu gugatan diterima dalam praktek peradilan.

1. **Kerangka Teoritik**

Istilah "teori" yang tercantum dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki akar kata dari "theoria". Dalam rangka menguraikan masalah penelitian secara mendalam, dibutuhkan kerangka teori yang berfungsi sebagai alat analisis. Pemikiran Fred N Kerlinger menyampaikan bahwa teori merupakan rangkaian konstruk (konsep), pembatasan serta pernyataan yang menghadirkan cara pandang terstruktur mengenai suatu fenomena melalui penjabaran relasi antarvariabel yang bertujuan memberikan penjelasan dan perkiraan tentang gejala tersebut (Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016:6).

Dasar pemikiran yang berasal dari teori menjadi pondasi utama dalam menyelesaikan beragam masalah yang muncul saat melakukan penelitian. Kerangka berpikir berbasis teori ini berperan sebagai pedoman yang menuntun arah penelitian secara tepat. Dalam susunannya, basis teori mengandung rangkaian konsep, batasan pengertian, serta pernyataan yang memperlihatkan fenomena secara terstruktur dan menguraikan kaitan antar variabel untuk memperkirakan dan menjelaskan fenomena yang ada. Selain itu, teori memiliki fungsi sebagai cara pandang dan titik awal untuk mendalami pemikiran objek penelitian, menginterpretasikan dan memberikan arti pada setiap fenomena dalam upaya menyusun konsep.

1. Teori Perjanjian (*Contract Theory*)

Dalam konteks hukum, kata perjanjian memiliki makna yang identik dengan kontrak. Kesetaraan makna ini bersumber dari ketentuan yang tercantum dalam Buku III Bab Kedua KUHPerdata, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian (Evi Arriyani, 2013:4). Definisi resmi perjanjian yang termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdata menggambarkan suatu tindakan yang menimbulkan ikatan antara satu pihak dengan pihak lainnya, baik melibatkan individu tunggal maupun jamak. Dalam pandangan yang disampaikan oleh Subekti, konsep perjanjian dapat dipahami sebagai suatu kejadian di mana terdapat kesepakatan antara dua belah pihak untuk melaksanakan sebuah kesepakatan tertentu (Subekti, 2008:1).

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdata, sebuah perjanjian dimaknai sebagai tindakan yang mengikat antara dua pihak atau lebih. Dalam pandangan yang disampaikan oleh Setiawan (2008:49), interpretasi Pasal 1313 KUHPerdata ini memiliki beberapa keterbatasan. Beliau menggarisbawahi bahwa rumusan tersebut belum mencakup keseluruhan aspek, mengingat cakupannya hanya terbatas pada kesepakatan unilateral. Di samping itu, penggunaan istilah "perbuatan" dalam pasal tersebut dinilai terlampau luas, sebab dapat mencakup aktivitas sukarela dan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, Setiawan mengajukan dua poin penyempurnaan: pertama, mengusulkan agar istilah perbuatan perlu dispesifikkan sebagai perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi yuridis; kedua, menyarankan penambahan frasa yang menekankan aspek timbal balik dalam pengikatan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdata.

1. Teori Pembuktian dalam hukum perdata, terutama terkait dengan hubungan utang piutang tanpa perjanjian tertulis, berfokus pada cara-cara untuk membuktikan bahwa suatu perjanjian atau kewajiban telah terjadi. Dalam konteks ini, ada berbagai teori yang mengatur dan menjelaskan tentang pembuktian dalam hukum perjanjian, termasuk dalam hubungan utang piutang yang tidak tertulis.
   * + - 1. Teori Pembuktian dengan Saksi; Pembuktian dalam hukum perdata sering kali melibatkan saksi yang dapat menguatkan klaim mengenai adanya perjanjian. Saksi dapat memberikan keterangan mengenai apa yang mereka dengar atau saksikan langsung terkait perjanjian yang tidak tertulis.(Sudikno Mertokusumo,2007:10)
         2. Teori pembuktian dengan bukti yang tidak tertulis;

Meskipun tidak ada perjanjian tertulis yang sah, bukti-bukti lain seperti dokumen yang berkaitan dengan transaksi (seperti surat-surat elektronik, rekaman percakapan, atau pesan teks) dapat digunakan untuk membuktikan adanya perjanjian utang piutang.(Kansil,2001:8)

* + - * 1. Teori Pembuktian dengan Perbuatan Hukum;

Tindakan yang menunjukkan adanya kehendak untuk terikat pada suatu kewajiban bisa menjadi alat pembuktian. Misalnya, memberikan uang pinjaman atau barang sebagai bentuk transaksi yang dapat membuktikan adanya perjanjian meski tidak tertulis.(Harahap,2007;13)

* + - * 1. Teori Pembuktian dengan Itikad Baik;

Dalam konsep ini diuraikan bahwa proses pembuktian pada hubungan utang piutang mempertimbangkan aspek ketulusan para pihak yang bersangkutan. Ketika seseorang memperlihatkan kesungguhan niat dalam bertransaksi, walaupun tidak didasari perjanjian tertulis, kondisi tersebut bisa diterima sebagai instrumen pembuktian .(Sutedi;201,15)

1. Teori Kepastian Hukum.

Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum merupakan susunan dari norma-norma yang saling berkaitan. Beliau menjelaskan bahwa norma dapat dipahami sebagai suatu ungkapan yang memberikan penekanan pada aspek das sollen (keharusan) yang memuat berbagai ketentuan mengenai tindakan yang perlu dijalankan. Dalam pandangannya, norma-norma terbentuk dari hasil pemikiran dan kegiatan manusia yang terencana. Selanjutnya, berbagai ketetapan yang termuat dalam undang-undang bersifat universal dan berfungsi sebagai acuan perilaku setiap anggota masyarakat, mencakup interaksi antar pribadi serta hubungan antara individu dengan kelompok sosial dalam konteks pemberian kewajiban atau pelaksanaan aktivitas tertentu. Implementasi dan keberadaan regulasi tersebut menghasilkan suatu kondisi kepastian hukum. (Peter Mahmud,2008:58)

Utrech memaparkan bahwa kepastian hukum memiliki dua makna pokok. Makna pertama merujuk pada keberadaan ketentuan bersifat universal yang memberikan pemahaman kepada setiap orang mengenai batasan tindakan yang diizinkan dan dilarang. Sementara makna kedua berhubungan dengan perlindungan hukum yang menjamin setiap warga dari tindakan sewenang-wenang penguasa, dimana melalui keberadaan peraturan universal tersebut, setiap orang mampu memahami batas-batas kewajiban yang dapat ditetapkan negara terhadap warganya (Ridwan Syahrani,1999:23).

Gustav Radbruch berpendapat bahwa sebuah hukum perlu memuat tiga komponen nilai identitas (Peter Mahmud,2008:58), yang terdiri dari:

* + - * 1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*) yang mengacu pada perspektif yuridis dalam penerapannya;
        2. Asas keadilan hukum (*gerectigheit*), yang berfokus pada dimensi filosofis, dengan pengertian bahwa setiap individu memperoleh perlakuan setara dalam proses peradilan;
        3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) yang juga dikenal sebagai doelmatigheid atau utility dalam sistem hukum.

Sasaran utama hukum terletak pada penciptaan kemakmuran untuk seluruh lapisan penduduk, dimana Bentham menyatakan bahwa kebahagiaan tertinggi hendaknya dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin orang (Otje Salman, 2008;156). Berdasarkan pandangan teori utilitarian, arah hukum diorientasikan untuk memperoleh kegunaan maksimal yang menghadirkan kegembiraan optimal bagi sejumlah besar populasi. Suatu sistem hukum dinilai berkualitas ketika mampu menghadirkan kegunaan yang berlimpah untuk masyarakat luas. Namun, kerangka teori tersebut belum memberikan penjelasan spesifik terkait pihak-pihak yang seharusnya menerima berbagai manfaat tersebut. Sebenarnya, implementasi hukum dapat dikatakan berhasil bila menghasilkan rasa keadilan. Para pengikut pemikiran ini menyepakati bahwa orientasi hukum mencakup aspek kegunaan serta kepastian hukum. Dalam pelaksanaannya, seringkali muncul pertentangan di antara beragam prinsip yang ada (Sidharta, 2006:86).

Bagi masyarakat yang mengupayakan keadilan, keberadaan kepastian hukum menjadi sandaran utama menghadapi perilaku semena-mena oknum penegak hukum yang kerap bersikap angkuh saat melaksanakan kewajibannya. Kepastian hukum mengandung pengertian bahwa setiap unsur - mulai dari ketentuan hukum, pihak yang terlibat, sasaran penerapan, hingga sanksi yang diberlakukan - harus memiliki kejelasan. Dalam perspektif normatif, kepastian hukum terwujud ketika sebuah regulasi ditetapkan dan diberlakukan dengan landasan yang terukur serta pertimbangan yang masuk akal. Kejelasan tersebut tercermin dalam harmonisasi antar sistem norma yang berlaku, sehingga meminimalisir potensi pertentangan atau ketidakselarasan antar norma. Implementasi hukum yang memiliki kepastian ditandai dengan penerapan aturan yang gamblang, tidak berubah-ubah, selaras dan berkesinambungan tanpa terpengaruh berbagai kondisi yang bersifat personal. Aspek kepastian bersama keadilan merupakan karakteristik mendasar dari sistem hukum, bukan sekadar tuntutan etika semata. Sebagaimana disampaikan Cst Kansil (2009:385), ketiadaan kepastian dan keadilan dalam sebuah hukum menjadikannya lebih dari sekadar aturan yang tidak berkualitas.

1. **Metode Penelitian**
2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian berbasis pustaka (library research). Metode pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini bersumber dari ragam dokumen tertulis. Pendekatan ini dipilih sebagai cara untuk menggali pemahaman mengenai konsep, teori, serta gejala yang telah terdokumentasi dalam berbagai sumber bacaan.

Sebagaimana diungkapkan oleh R. Poppy Yaniawati (2020) bahwa aktivitas penelitian pustaka merupakan proses pendalaman materi melalui beragam sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, laman internet, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, dimana sumber-sumber tersebut mengandung informasi yang sesuai untuk menemukan solusi dan dasar teori bagi permasalahan yang sedang diteliti.

1. **Pendekatan Penelitian**

Sebagaimana diungkapkan oleh Cholid Narbuko dan Abu Achmadi (2023:1), metode penelitian dapat dipahami sebagai rangkaian langkah sistematis yang mengandalkan pemikiran cermat dalam upaya mencapai sasaran tertentu, mulai dari proses pengumpulan informasi, pendokumentasian, pengorganisasian, perumusan konsep, dan pelaksanaan analisis hingga penyusunan dokumen hasil penelitian. Metode penelitian juga bisa diartikan sebagai kerangka kerja yang mengarahkan pelaksanaan suatu penelitian dalam rangka memperoleh solusi dari pokok permasalahan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif melalui observasi secara intensif pada subjek yang diamati untuk memperoleh hasil yang menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengutamakan pemanfaatan sumber-sumber literatur seperti peraturan hukum dan perundang-undangan, referensi ilmu hukum, artikel ilmiah, serta dokumentasi seminar terkait, tanpa melibatkan perhitungan statistik maupun numerik. Pendekatan dengan metode kualitatif ini dijalankan melalui proses analisis berbagai variabel yang berhubungan untuk merumuskan hipotesis yang perlu dibuktikan kebenarannya.

1. **Sumber Data**

Penelitian ini memanfaatkan beragam sumber informasi yang mencakup data primer, data sekunder, serta data tersier sebagai acuan dan landasan untuk mencapai sasaran penelitian yang telah ditetapkan.

1. Data Primer.

Informasi utama dalam penelitian ini berasal dari data primer yang didapatkan secara langsung dari sumbernya. Hal ini merujuk pada berbagai ketentuan hukum, regulasi perundang-undangan, dan keputusan pengadilan yang menjadi data primer sebab merupakan fokus pokok dalam penelitian ini. Adapun rujukan fundamental yang digunakan ialah Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

1. Data Sekunder.

Sumber informasi tambahan yang berasal dari rujukan pustaka didapatkan sebagai data sekunder. Dalam rangka menyempurnakan informasi yang didapat dari sumber data primer, setiap kegiatan penelitian umumnya memanfaatkan data sekunder sebagai pelengkap. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder berperan penting sebagai alat bantu untuk menginterpretasikan dan memaparkan hasil yang diperoleh dari sumber data primer. Pengumpulan data sekunder dilaksanakan dengan mengacu pada berbagai sumber hukum sekunder, yang mencakup literatur-literatur bidang hukum, ensiklopedi hukum, serta berbagai tulisan ilmiah yang membahas persoalan-persoalan di bidang hukum.

1. Data Tersier.

Data tersier merupakan kumpulan data yang berfungsi sebagai sumber rujukan dan penjabaran untuk data primer serta data sekunder, yang mencakup:

1. Kamus Hukum;
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
3. **Metode Pengumpulan Data.**

Dalam pelaksanaan penelitian, data menjadi unsur yang sangat menentukan. Sebagai landasan pembuktian hipotesis dan solusi persoalan penelitian, data berperan sebagai sumber informasi utama. Proses perolehan data dilaksanakan melalui serangkaian tahapan pengumpulan data yang sistematis. Aktivitas pengumpulan data dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni metode konvensional dengan mengunjungi perpustakaan secara langsung atau melalui pemanfaatan jaringan internet. Dalam pendekatan konvensional, pengumpulan data menggunakan beberapa metode seperti penelitian pustaka, literature review, atau library research yang mencakup pencarian berbagai sumber tertulis, mulai dari peraturan hukum dan perundangan, referensi buku-buku hukum, hasil penelitian hukum, hingga berbagai pandangan pakar yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti.

1. **Metode Analisa Data**

Analisa data adalah kegiatan dalam suatu penelitian untuk memperoleh informasi yang valid dari hasil pengumpulan data, dengan cara memeriksa seluruh bentuk data dalam komponen penelitian, seperti, catatan, dokumen, hasil wawancara, dan sebagainya.Penelitian ini menggunakan metode analisa data kualitatif yang merupakan tehnik analisa data yang berfokus pada penjelasan, latar belakang, penyebab, serta hal-hal yang mendasari topic atau permasalahan yang dimaksud. Sumber data akan dianalisa secara normative kemudian disajikan secara deskripsi naratif yang memberi kesimpulan atas penelitian ini. Analisa data kualitatif merupakan proses pengorganisasian dengan menguraikan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema yang disajikan dalam bentuk narasi (Djulaikha, Devi Rahayu, 2019 ; 20-21).

1. **Sistimatika Penulisan**

Untuk memberikn gambaran tentang isi Proposal ini maka Penulis menyusun Sistimatika :

Bab I : Pendahuluan.

Bab I ini merupakan awal penulisan yang memberi gambaran tentang : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistimatika Penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka.

Bab II berisikan uraian tentang tinjauan konseptual tentang utang piutang, perjanjian, teori-teori perjanjian, teori pembuktian dan teori kepastian hukum.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan.

Bab III berisi tentang Metodologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Termasuk di dalamnya, tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisa Data.

Bab IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan.

Bab IV ini akan menyajikan hasil temuan yang didapat selama penelitian ini dilakukan, yang akan disajikan secara komprehensip beserta dengan pembahasannya. Pada bab IV ini nanti akan didapatkan gambaran tentang substansi permasalahan yang menjadi bahasan dalam penelitian ini, yang akan menjawab persoalan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Bab V : Penutup.

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan berdasarkan analisa data yang telah dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dan diuraikan dalam penulisan. Bab V ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

**BAB II**

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

**A. Tinjauan Pustaka**

**Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.**

Dalam bahasa Belanda, kata overeenkomst mengacu pada konsep perjanjian yang dapat dipadankan dengan istilah persetujuan (Leli Joko Suryono, 2014:43). Suatu perjanjian muncul sebagai bentuk kesepakatan dimana berbagai pihak membuat komitmen untuk menjalankan aktivitas spesifik. Sebagaimana diungkapkan Subekti, sebuah perjanjian terwujud manakala individu-individu yang terlibat menyatakan kesediaan untuk melakukan kesepakatan atau berkomitmen melaksanakan sesuatu (Subekti, 2004:3). Dengan demikian dapat dipahami bahwa perjanjian merupakan kesepakatan yang mengikat minimal dua individu dalam rangka menyelenggarakan suatu aktivitas, dimana tercapai kesepahaman bersama terkait aspek kepemilikan harta benda.

Ketika dua individu membuat perjanjian, terciptalah sebuah relasi yang menghasilkan keterikatan berupa hak serta kewajiban para pihak dalam mencapai suatu prestasi. Sebagaimana disampaikan Syahmin (2006:1), konsep perikatan merupakan serangkaian ungkapan yang memuat berbagai kesepakatan atau komitmen, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam konteks formal, kesepakatan yang dibuat secara tertulis biasa dikenal sebagai perjanjian. Definisi perjanjian tidak hanya berasal dari pandangan akademisi, namun juga termuat dalam ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan KUHPerdata Indonesia, konsep perjanjian atau kesepakatan diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan ikatan antara satu pihak atau lebih dengan pihak lainnya. Menurut Sudaharyo Soimin (2008:238), dalam Buku III Bab Kedua KUHPerdata Indonesia, terminologi perjanjian atau persetujuan (contract or agreement) mengandung pengertian yang identik dengan konsep perjanjian, yaitu situasi dimana terdapat kesepakatan antara dua pihak untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu. Sebagaimana dikemukakan Kartini Mulyadi (2014:92), interpretasi Pasal 1313 KUHPerdata memberikan penegasan bahwa perjanjian menciptakan keterikatan satu pihak kepada pihak yang lain.

Menurut pandangan yang disampaikan Abdulkadir Muhammad dalam karya tulisnya yang berjudul Hukum Perdata Indonesia, rumusan perjanjian pada Pasal 1313 KUHPerdata mengandung sejumlah kekurangan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal tersebut tercermin dari penggunaan frasa "mengikatkan diri" yang mengindikasikan keterlibatan tunggal, bukan mutual. Sepatutnya formulasi yang digunakan menggambarkan keterikatan timbal balik untuk mencerminkan adanya consensus di antara para pihak.
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa *consensus.*

Interpretasi kata tersebut dapat mencakup aktivitas zaakwarneming (penyelenggaraan kepentingan) dan onrechtmatige daad (tindakan melawan hukum) yang tidak mengandung unsur consensus, sehingga penggunaan kata "persetujuan" dinilai lebih tepat.

1. Pengertian Perjanjian Perlalu luas.

Cakupannya meluas hingga perjanjian perkawinan dalam ranah hukum keluarga, padahal konteks yang dimaksud seharusnya terbatas pada relasi debitur-kreditur terkait aset. Ketentuan dalam Bab III KUHPerdata sesungguhnya hanya mencakup perjanjian bersifat kebendaan, bukan aspek personal.

1. Tanpa menyebut tujuan atau memiliki tujuan yang tidak jelas. Formulasi dalam Pasal 1313 KUHPerdata tidak menyertakan tujuan pembentukan perjanjian, mengakibatkan ketidakjelasan arah dari ikatan yang dibuat oleh para pihak (Abdulkadir Muhammad,2004;224-225).

Berdasarkan pandangan Suryodiningrat yang dimuat dalam karya Agus Yudha Hernoko, terdapat beberapa bantahan terhadap rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 kuhperdata, yang diuraikan dalam empat pokok pemikiran berikut:

1. Hukum sesungguhnya tidak memiliki kaitan langsung dengan berbagai bentuk perikatan maupun sumber-sumbernya, mengingat bila dimaknai secara meluas, setiap bentuk kesepakatan dapat dianggap sebagai persetujuan.
2. Istilah perbuatan yang diinterpretasikan secara lebar berpotensi menghasilkan dampak hukum yang tidak direncanakan sebelumnya, seperti tindakan yang mengakibatkan kerugian akibat pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku.
3. Rumusan dalam Pasal 1313 kuhperdata tersebut terbatas pada kesepakatan yang bersifat unilateral, dimana kewajiban hanya melekat pada satu pihak tanpa timbal balik dari pihak lainnya, contohnya dalam kasus hibah. Padahal, seharusnya kesepakatan mengandung unsur resiprokal yang melibatkan prestasi dari kedua belah pihak.
4. Cakupan Pasal 1313 kuhperdata hanya mengatur perjanjian obligatoir yang menciptakan hak dan kewajiban para pihak, namun tidak mencakup bentuk-bentuk perjanjian lain seperti perjanjian liberatoir, perjanjian dalam konteks hukum keluarga, perjanjian terkait kebendaan, serta perjanjian pembuktian (Agus Yuda Hernoko,2010;16-17).

Mengingat adanya ketidaksempurnaan dalam isi Pasal 1313 KUHPerdata, sejumlah pakar hukum berupaya mengajukan rumusan pengertian perjanjian secara lebih menyeluruh, sebagaimana disampaikan oleh:

1. Hendri Raharjo.

Menyatakan bahwa perjanjian mengandung makna sebagai suatu hubungan hukum dalam ranah kekayaan material yang berlandaskan persetujuan bersama di antara para subjek hukum, di mana setiap pihak terikat satu sama lain sehingga menciptakan hak dan kewajiban yang saling berimbang dalam pelaksanaan prestasi sesuai kesepakatan bersama, yang pada akhirnya menghasilkan konsekuensi hukum tertentu (Hendri Raharjo,2009;42).

1. KRMT Tirtodiningrat.

Mengungkapkan bahwa perjanjian merupakan tindakan hukum yang berawal dari kesepakatan antara minimal dua pihak, yang kemudian memunculkan dampak-dampak hukum yang bisa dijalankan berdasarkan ketentuan undang-undang (Tirtodiningrat,2008;14).

1. Salim H. S. mengungkapkan bahwa rumusan perjanjian yang tercantum pada Pasal 1313 KUHPerdata mengandung beberapa kekurangan, yang meliputi
2. Rumusannya mengandung ketidakjelasan, sebab segala tindakan bisa dikategorikan sebagai perjanjian;
3. Tidak mencerminkan adanya asas konsensualisme;
4. Mengandung sifat dualism.

Salim memaparkan bahwa setelah mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang ada, perjanjian dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum yang mengikat dua subyek hukum dalam ranah kepemilikan aset. Dalam konteks ini, satu pihak memiliki hak untuk menerima hasil kerja, sementara pihak lainnya memiliki kewajiban untuk memberikan hasil kerja sesuai kesepakatan yang sudah ditetapkan bersama (Salim, 2005:15-17).

Berdasarkan pengertian perjanjian yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa komponen pokok yang membentuk sebuah perjanjian, sebagaimana dikemukakan oleh Gunawan Wijaya (2008), yang meliputi:

1. Keberadaan suatu peristiwa hukum;
2. Keterlibatan minimal dua pihak; serta
3. Munculnya ikatan hukum yang menghubungkan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian sebagai akibat dari peristiwa hukum tersebut.

Suatu kesepakatan dalam perjanjian mengandung dua unsur tindakan hukum, yakni pengajuan kesediaan oleh satu pihak serta penerimaan oleh pihak lainnya yang berlandaskan persetujuan bersama, sebagaimana diungkapkan oleh Sudikno (1999:110). Menurut pandangan OC Kaligis (2013:13), ketika suatu perjanjian memperoleh status setara dengan undang-undang, hal ini mengakibatkan terciptanya ikatan antara kedua pihak yang menghasilkan sejumlah hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan, yang kemudian dikenal sebagai prestasi. Sutarno (2023:74) mengemukakan bahwa perjanjian merupakan suatu momentum di mana individu menyatakan kesanggupan kepada individu lainnya atau ketika dua individu saling menyatakan kesanggupan untuk menjalankan suatu aktivitas tertentu, yang selanjutnya memunculkan suatu hubungan hukum di antara pihak-pihak terkait yang diistilahkan sebagai perikatan.

Suatu perjanjian menghasilkan ikatan atau hubungan hukum yang mengakibatkan munculnya hak serta kewajiban bagi setiap individu yang terlibat dalam pembuatan perjanjian tersebut. Setiap pihak yang berpartisipasi wajib mentaati kesepakatan yang sudah disusun bersama. Meskipun perjanjian memiliki kedudukan serupa dengan ketentuan perundang-undangan, ruang lingkup berlakunya terbatas pada pihak-pihak yang menandatanganinya. Pelaksanaan perjanjian bisa diupayakan pemberlakuannya lewat jalur pengadilan sebagai institusi resmi. Sistem hukum memberikan konsekuensi berupa sanksi kepada siapapun yang melanggar atau tidak memenuhi kesepakatan (wanprestasi). (Burhanuddin Ali dkk, 2009:150)

Setiap ketentuan maupun norma sesungguhnya mengandung landasan pemikiran dan pegangan asas yang berperan sebagai jiwa penggeraknya. Sebagaimana diungkapkan Agus Yudha (2013:21), akan menjadi tidak wajar bila sebuah norma berjalan tanpa memiliki landasan pemikiran dan pegangan asas dalam pelaksanaan kegiatannya. Dalam pandangan Satjipto Raharjdjo (2000:23), asas hukum memiliki peran strategis sebagai pondasi pemberi petunjuk, sasaran dan penilaian pokok, yang di dalamnya terkandung berbagai nilai dan ketentuan moral. Bachan Mustafa (2003:49) mengemukakan bahwa dalam rangkaian sistem yang terpadu, asas, norma dan tujuan hukum berperan sebagai penuntun serta tolok ukur bagi tingkah laku masyarakat. Sementara itu, J.J.H. Bruggink (1996:119) mengutip pemikiran Dworkin yang menyatakan bahwa aturan hukum tidak sekedar memuat substansi yang nyata dan bisa diimplementasikan dengan cepat, namun juga mengandung karakteristik yang bersifat menyeluruh atau tidak sama sekali (alles of niets karakter).

Ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berasal dari bahasa Belanda menggunakan istilah "syarat adanya perjanjian" (bestaanbaarheid der overeenkomsten), bukan "syarat sahnya perjanjian". Penggunaan ungkapan "syarat adanya perjanjian" ini menimbulkan ketidaksesuaian dalam penerapannya. Ketidaksesuaian tersebut muncul mengingat terdapat situasi dimana sebuah perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 1320 KUHPerdata masih dapat berlaku dan tidak otomatis batal. Sebagai contoh, bila ditemukan cacat kehendak dalam sebuah kontrak yang meliputi unsur pemaksaan, kecurangan, kesalahan interpretasi, atau pemanfaatan situasi secara tidak wajar, dampaknya hanya berupa kemungkinan pembatalan. Begitu pula dengan perjanjian yang disusun oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan, tidak serta-merta mengakibatkan pembatalan perjanjian tersebut. Selama belum ada tindakan pembatalan, status perjanjian tetap dianggap berlaku (Ridwan Khairandy,2013;167). Menurut Marilang (2017;1), terbentuknya suatu perjanjian bersumber dari dua hal pokok yaitu keberadaan perikatan dan instruksi undang-undang. Kondisi ini mempengaruhi kekuatan mengikat dari kontrak yang dibuat. Ketika kontrak terbentuk berdasarkan perikatan, sifat mengikatnya terbatas pada pihak-pihak yang terlibat sesuai asas pacta sunt servanda, sementara jika kontrak muncul atas dasar undang-undang, maka sifat mengikatnya berlaku menyeluruh bagi setiap pihak yang tercakup dalam peraturan tersebut.

1. **Jenis-Jenis Perjanjian.**

Menurut Hendri Rahardjo, perjanjian yang ada di Indonesia dapat dibedakan menurut berbagai cara yaitu:(Hendri Raharjo,2009;59)

1. Perjanjian Menurut Sumbernya:
2. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, misalnya perkawinan;
3. Perjanjian yang bersumber dari hukum kebendaan, adalah perjanjian yang berhubungan dengan peralihan hukum benda;

c) Perjanjian Obligatoir, adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban;

d) Perjanjian yang bersumber dari hukum acara;

e) Perjanjian yang bersumber dari hukum publik.

1. Perjanjian menurut hak dan kewajiban para pihak, dibedakan menjadi:

Perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi keduanya;

Perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedangkan pihak lain hanya hak saja;

Perjanjian menurut keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi para pihak yang lain, dibedakan menjadi;

Perjanjian cuma-cuma, adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak, misalnya perjanjian hibah;

Perjanjian atas beban, adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontraprestasi dari pihak lain dan antara kedua prestasi itu terdapat hubungan hukum, misalnya perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa.

1. Perjanjian Menurut Namanya, dibedakan menjadi: (Salim,2003;250)

Perjanjian Bernama (*nominaat*), adalah perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata, misalnya; perjanjian yang terdapat dalam buku III bab V-XVIII KUHPerdata tentang perjanjian jual-beli, perjanjian tukar menukar, dan lain-lain,

Perjanjian Tidak Bernama (*innominaat*), yaitu perjanjian yang tumbuh, timbul dan hidup dalam masyarakat karena berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan perjanjian ini belum dikenal pada saat KUHPerdata diundangkan, misalnya; perjanjian waralaba dan lain-lain.

1. Perjanjian Menurut Bentuknya, terbagai menjadi 2 (dua) yaitu: (Wirjono,2000;13)
2. Perjanjian Lisan, terbagi menjadi dua yaitu;
   * 1. Penjanjian konsensual, adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja sudah cukup untuk timbulnya perjanjian yang bersangkutan;
     2. Perjanjian Riil, adalah perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadinya penyerahan barang atau kata sepakat bersamaan dengan penyerahan barangnya. Misalnya perjanjian penitipan barang.
3. Perjanjian Tertulis, terbagai 2 (dua) yaitu:
   * 1. Perjanjian standart atau baku, adalah perjanjian berbentuk tertulis berupa formulir yang isinya telah dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh produsen tanpa mempertimbangkan kondisi konsumen;
     2. Perjanjian Formal, adalah perjanjian yang telah ditetapkan dengan formalitas tertentu, misalnya perjanjian hibah harus dibuat dengan akta notaris.
4. Perjanjian yang bersifat istimewa, dibedakan menjadi:
5. Perjanjian Liberatoir, adalah perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misalnya pembebasan hutang (Pasal 1438 KUHPerdata);
6. Perjanjian Pembuktian, yaitu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka;
7. Perjanjian Untung-untungan, misalnya perjanjian asuransi;
8. Perjanjian Publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu bertindak sebagai penguasa.
9. Perjanjian Penanggungan (*borgtocht*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1820 KUHPerdata, perjanjian penanggungan adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur tidak memenuhi perikatannya.

1. Perjanjian Menurut Sifatnya, dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu;

Perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang utama, misalnya perjanjian kredit bank;

Perjanjian *accesoir,* yaitu perjanjian tambahan yanag mengikuti perjanjian utama, misalnya; pembebanan hak tanggungan atau fidusia, gadai.

1. Perjanjian Kerjasama:

Menurut Riduan Syahrani (1999:50), suatu perjanjian kerjasama dapat dipahami sebagai perpaduan dua bentuk kesepakatan, yaitu perjanjian timbal balik serta perjanjian tak bernama, dimana hal ini menghasilkan tanggung jawab utama beserta hak yang mengikat para pihak, meskipun bentuk pengaturannya sendiri tidak tercantum dalam ketentuan KUHPerdata.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, suatu perjanjian kerjasama merupakan bentuk kesepakatan spesifik yang mengandung asas kebebasan berkontrak. Ketika individu-individu memutuskan untuk terikat dalam suatu perjanjian, dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh pihak yang menyetujuinya. Namun, keabsahan perjanjian ini bergantung pada kesesuaiannya dengan tiga aspek utama: regulasi yang berlaku, norma kesopanan, dan tatanan sosial yang ada. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, kesepakatan yang telah disusun akan berfungsi layaknya peraturan yang wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam pembentukannya.

1. **Asas-Asas Perjanjian.**

Seluruh individu yang terlibat dalam pembuatan perjanjian berkewajiban memahami serta mematuhi asas-asas perjanjian yang berlaku. Sebagaimana diungkapkan Sarsiorini (2019:101) bahwa asas perjanjian menjadi pondasi nilai kebaikan serta perilaku dalam penyusunan perjanjian. Berdasarkan regulasi hukum yang diberlakukan, terdapat beberapa asas-asas fundamental yang menjadi dasar dalam perjanjian sebagaimana tercantum pada ketentuan KUHPerdata, di antaranya:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract).*

Individu memiliki keleluasaan dalam menyusun perjanjian dengan ketentuan mengikuti persyaratan keabsahan perjanjian serta mematuhi batasan hukum, norma moral, dan tatanan sosial. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa setiap kesepakatan yang disusun dengan sah memiliki kekuatan setara undang-undang bagi para pihak yang terlibat. Mengacu pada asas kebebasan berkontrak, setiap individu memperoleh kesempatan menyusun perjanjian dengan berbagai muatan sepanjang tidak berbenturan dengan peraturan perundangan, nilai moral dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks hukum perjanjian, cakupan keleluasaan berkontrak mencakup beberapa aspek: pilihan untuk mengadakan atau menolak perjanjian, penentuan mitra dalam kesepakatan, penetapan dasar perjanjian yang hendak dibuat, pemilihan objek kesepakatan, penentuan format perjanjian, serta opsi untuk mengadopsi atau mengabaikan ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (aanvullend optional). (Sultan Remy,147)

Dalam Buku ke III KUHPerdata, asas kebebasan berkontrak menjadi karakteristik utama yang memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk mengabaikan ketentuan-ketentuan di dalamnya, namun pengecualian berlaku pada beberapa pasal yang memiliki sifat imperatif.

1. Asas konsensualisme.

Pada ranah hukum perjanjian, pengertian asas konsensualisme bermula dari istilah concensus, yang mengandung makna persetujuan bersama antar pihak terkait substansi perjanjian. Suatu perjanjian mulai berlaku ketika terwujudnya persetujuan bersama (Ahmad Miru,2013;3). Setiawan (2008;13) mengutip pandangan Subekti yang menyatakan bahwa asas konsensus mulai berlangsung tepat saat tercapainya persetujuan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak hukum dari sebuah perjanjian mulai mengikat begitu tercapai persetujuan antara semua pihak yang terlibat. Ketentuan mengenai asas konsensualisme ini tercantum dalam aturan KUHPerdata yakni Pasal 1338 (1) jo Pasal 1320 ayat 1.

Dalam membentuk suatu perjanjian, asas konsensualisme mengutamakan keberadaan persetujuan bersama antar pihak yang mengikatkan diri, tanpa memerlukan tindakan hukum tambahan, kecuali untuk perjanjian formal (A Qiram,2005;20). Meskipun asas konsensualisme menjadi jiwa yang mendasari terbentuknya kesepakatan dalam perjanjian, beberapa kondisi menunjukkan bahwa suatu perjanjian bisa tidak menggambarkan bentuk persetujuan yang sebenarnya. Keadaan ini muncul akibat adanya cacat kehendak yang berperan dalam pembentukan perjanjian tersebut. Berdasarkan ketentuan BW, terdapat tiga aspek yang termasuk dalam kategori cacat kehendak, antara lain:

1. kesesatan atau *dwaling;*
2. penipuan atau *bedrog;*
3. paksaan atau *dwang.*

Ketika persetujuan yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait berada di luar batasan seharusnya, yakni mengandung unsur ketidaksempurnaan kehendak, kondisi tersebut berpotensi membahayakan keberadaan perjanjian yang bersangkutan.

1. Asas Daya Mengikat Kontrak (*Pacta Sun Servanda*).

Dalam sistem hukum perjanjian, asas pacta sunt servanda memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai landasan utama terbentuknya suatu perjanjian. Istilah yang berawal dari bahasa latin ini mengandung makna bahwa setiap kesepakatan wajib dilaksanakan oleh pihak yang menyetujuinya (Hasan, 2005:9). Ketentuan mengenai asas pacta sunt servanda, yang juga dikenal sebagai asas kekuatan mengikat, memiliki kaitan erat dengan dampak yang muncul dari sebuah perjanjian. Pengertian dari prinsip ini menunjukkan bahwa setiap kesepakatan yang disusun dengan sah akan menghasilkan ikatan yang wajib dipatuhi layaknya peraturan perundangan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga mereka berkewajiban menjalankan seluruh butir yang telah disepakati. Hal ini tercermin dalam rumusan hukum positif yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibentuk secara sah memiliki kedudukan setara dengan undang-undang bagi para pembuatnya (Subekti, 2002:10). Grotius berpendapat bahwa munculnya asas pacta sunt servanda bersumber dari pemahaman dimana sebuah kontrak memiliki sifat mengikat secara alami yang didasarkan pada dua pertimbangan pokok (Grotius, 2002:2).

1. Karakteristik sederhana menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan komunikasi antarindividu, dimana hal tersebut mengandung unsur kepercayaan yang menghasilkan nilai-nilai ketulusan dan loyalitas;
2. Setiap manusia memegang hak-hak tertentu, dengan hak kepemilikan sebagai aspek paling fundamental yang dapat ditransfer kepada pihak lain. Ketika seorang individu memperoleh kewenangan untuk mengalihkan hak kepemilikannya, maka sudah sewajarnya tidak perlu ada pembatasan baginya untuk mengalihkan hak-hak lain yang tingkatannya lebih rendah, terutama melalui mekanisme perjanjian.

Dasar hukum mengenai asas *pacta sunt servanda* pada hukum positif diatur dalam Pasal 1338 (1) dan (2) KUHPerdata yang memberikan definisi: (Subekti,28)

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
2. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu;

Dalam membentuk suatu perjanjian, penerapan asas pacta sunt servanda menjadi kebutuhan mendasar selama fase pra-kontraktual untuk memastikan kesungguhan maksud para pihak. Pelaksanaan proses negosiasi pada periode kontraktual membutuhkan landasan kejujuran serta rasa saling percaya antar pihak. Sementara itu, implementasi prinsip ini pada masa post-kontraktual berfungsi sebagai dasar akuntabilitas dalam menjalankan kesepakatan yang telah ditetapkan, sebagaimana dikemukakan oleh Irman (2007:29).

Menurut pandangan yang disampaikan Aziz Saliba, asas Pacta Sunt Servanda mencerminkan penghormatan tertinggi terhadap suatu perjanjian (sanctity of contracts). Dalam ranah hukum perjanjian, unsur terpenting terletak pada keleluasaan para pihak dalam membentuk kesepakatan, yang juga diistilahkan sebagai prinsip otonomi. Hal ini mengandung pengertian bahwa setiap individu memiliki kewenangan penuh untuk mengikatkan diri dalam berbagai bentuk perjanjian sesuai keinginannya, sepanjang masih berada dalam koridor hukum yang berlaku. Konsekuensinya, ketika para pihak sudah menyepakati untuk terikat dalam suatu perjanjian, maka mereka wajib mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum di dalamnya (Aziz,2001;16).

1. Asas *Privity of Contract* (Kepribadian)

Setiap individu memperoleh keleluasaan dari hukum untuk menetapkan pilihan terbaik saat mengadakan kontrak bersama pihak lain dalam rangka pemenuhan keperluannya, sebagaimana diungkapkan oleh Asser (1992:22). Sementara itu, terdapat dua syarat pokok yang perlu terpenuhi bagi subjek kontrak supaya dapat dianggap mempunyai kemampuan melakukan perbuatan hukum serta menyandang status hukum secara utuh, yaitu telah mencapai usia dewasa dan memiliki kondisi mental yang sehat.

Dalam lingkup hukum kontrak, asas privity of contract mengandung pengertian sebagai prinsip pembatas yang menegaskan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak penandatangan. Ketentuan dalam Pasal 1315 KUHPerdata menggariskan bahwa setiap individu tidak berwenang membuat ikatan atau mengajukan permintaan penetapan janji kecuali untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana disampaikan Subekti (2004:40), prinsip ini dikenal sebagai asas kepribadian dalam konteks perjanjian. Sebuah ikatan yang terbentuk dari kesepakatan secara alamiah memiliki kekuatan mengikat terbatas pada pembuatnya tanpa melibatkan pihak eksternal. Mulyadi (2004:11) menyatakan bahwa setiap bentuk perjanjian secara eksklusif mengatur perihal hak dan kewajiban yang melekat pada pihak-pihak penandatangan saja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata mengatur bahwa kesepakatan yang dibuat hanya mengikat para pihak yang menyusunnya. Individu di luar kesepakatan (pihak ketiga dalam perjanjian) tidak memiliki wewenang mengajukan tuntutan atas dasar kesepakatan tersebut. Namun, pembatasan ini memiliki pengecualian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang memberikan peluang pengajuan penetapan komitmen untuk keperluan pihak ketiga. Penerapan ketentuan dalam kesepakatan ini berpedoman pada dua syarat pokok: pertama, muatan kesepakatan secara gamblang mencakup kepentingan yang dimaksud, dan kedua, bagian pokok yang memuat isi kesepakatan menghasilkan manfaat bagi penerima (pihak ketiga).

Siti Malikhatun Badriyah (2016:139) menyatakan bahwa keseimbangan kepentingan di antara pihak-pihak yang terlibat menjadi sasaran utama dalam sebuah perjanjian. Hal ini berperan sebagai aspek pokok yang dimulai dari awal proses, mulai dari tahap pra kontraktual ketika penawaran berlangsung, berlanjut ke periode terbentuknya kesepakatan yang menghasilkan perikatan antar pihak dalam tahap kontraktual, hingga bermuara pada implementasi perjanjian yang bersifat mengikat bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dalam pandangan Herlien Budiono (2006:33), asas keseimbangan berfungsi sebagai penyelaras antara ketentuan-ketentuan hukum dan asas-asas fundamental perjanjian, yang mencerminkan perpaduan antara konsep hukum perdata berbasis pemikiran individualistis dengan metode pemahaman khas masyarakat Indonesia. Sebagaimana diungkapkan dalam berbagai ketentuan, prinsip keseimbangan mengandung makna terciptanya posisi setara terkait hak dan kewajiban semua pihak yang terikat perjanjian dalam situasi yang sepadan (ceteris paribus), tanpa adanya unsur penguasaan atau pemaksaan dari satu pihak terhadap pihak yang lain. Anita Kamilah (2012:104) mengemukakan bahwa implementasi asas keseimbangan dalam ranah hukum perjanjian tercermin melalui kewajiban para pihak untuk memperhatikan aspek kesusilaan, itikad baik, kepatutan, serta kepantasan saat menjalankan hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian tersebut.

Taufik (2016:52) menyatakan bahwa kesetaraan posisi para pihak dalam perjanjian mencerminkan antisipasi prospek mendatang secara netral untuk menghindari dampak merugikan terhadap salah satu pihak. Penguasaan substansi perjanjian menjadi keharusan mutlak, sementara prinsip kesetaraan dalam membuat kesepakatan merupakan aspek mendasar yang wajib diperhatikan saat menyusun perjanjian.

Dalam menciptakan keadilan pada hukum perjanjian, asas keseimbangan menjadi landasan yang paling pokok. Budiono (2006:78) menyatakan bahwa perlindungan wajib diberikan kepada pihak yang mengalami kerugian, dimana pelaku wanprestasi berkewajiban memikul dampak hukum serta bertanggung jawab atas segala konsekuensinya.

1. **Syarat Sahnya Perjanjian**

Berdasarkan pandangan yang disampaikan oleh Abdulkadir Muhammad, ketentuan yang menjadi dasar keabsahan sebuah perjanjian telah ditetapkan secara resmi dalam ketentuan hukum Pasal 1320 KUHPerdata, yang mengatur tentang:

1. Adanya persetujuan kehendak antara para pihak-pihak yang membuat perjanjian (*consensus*).

Suatu perjanjian memerlukan persetujuan kehendak yang mencerminkan kesepahaman antar pihak (consensus). Dalam konteks ini, persetujuan kehendak mengandung makna keselarasan pemikiran antar pihak terkait substansi perjanjian, di mana keinginan satu pihak selaras dengan keinginan pihak lainnya. Setiap pembentukan persetujuan umumnya diawali dengan proses perundingan (negotiation), yang memungkinkan masing-masing pihak menyampaikan informasi tentang objek dan ketentuan perjanjian, hingga terwujud kesepakatan bersama. Pengungkapan kehendak bisa dilaksanakan secara terbuka maupun tersirat, namun esensinya tetap mengarah pada persetujuan atas keinginan semua pihak. Karakteristik persetujuan kehendak bersifat independen, yang berarti terbebas dari segala bentuk intimidasi atau desakan pihak manapun dan murni berasal dari keinginan sukarela para pihak. Sebagaimana dijelaskan Abdulkadir Muhamad (2000:228-231), konsep persetujuan kehendak juga mensyaratkan ketiadaan unsur kekeliruan dan kecurangan.

Dalam pembentukan suatu kontrak, persetujuan antar pihak menjadi komponen yang tidak dapat diabaikan. Berbagai mekanisme dapat menghasilkan persetujuan, dengan penekanan utama pada keberadaan proses penawaran serta penerimaan dari penawaran itu sendiri. Penggunaan komunikasi lisan maupun tertulis dengan bahasa yang jelas merupakan metode yang umumnya dipilih oleh pihak-pihak yang terlibat. Sebagaimana dijelaskan oleh Salim (2003:33), dokumentasi perjanjian dalam bentuk tertulis memiliki dua fungsi strategis: menjamin kepastian hukum bagi setiap pihak serta berfungsi sebagai instrumen pembuktian yang sah ketika perselisihan muncul di masa mendatang.

1. Kecakapan Bertindak.

Kemampuan melaksanakan tindakan mengacu pada kesanggupan seseorang dalam menjalankan perbuatan hukum. Suatu aktivitas yang menghasilkan konsekuensi hukum dapat digolongkan sebagai perbuatan hukum. Individu yang bermaksud mengadakan perjanjian wajib memiliki kompetensi serta otoritas dalam pelaksanaan perbuatan hukum, sesuai ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1329 KUH Perdata disebutkan bahwa setiap individu dianggap memiliki kemampuan untuk membentuk perikatan-perikatan, selama tidak ada pernyataan ketidakcakapan oleh undang-undang terhadap dirinya. Sementara itu, Pasal 1330 KUHPerdata mengatur tentang kriteria pihak-pihak yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kecakapan hukum dalam pembuatan perjanjian, yaitu:

i. Orang-orang yang belum dewasa;

ii. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan

1. Istri. Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam konteks pengaturan standar kedewasaan, Buku III KUHPerdata yang mengatur tentang perikatan belum menetapkan parameter spesifik. Pengaturan mengenai batas usia justru tercantum pada Buku I KUH Perdata yang membahas tentang Orang. Merujuk pada ketentuan Pasal 330 Buku I KUH Perdata, status kedewasaan seseorang diperoleh saat mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun atau sudah melangsungkan pernikahan. Berdasarkan hal tersebut, bisa dimaknai bahwa regulasi perjanjian di Indonesia belum memiliki standar usia yang mengindikasikan kedewasaan seseorang. Adapun parameter usia untuk menentukan status kedewasaan seseorang sepenuhnya berada dalam ranah hukum perorangan dan hukum keluarga (Ridwan Khairandy,176).

1. Adanya obyek tertentu.

Suatu perjanjian mengharuskan adanya objek yang terdefinisi dengan pasti. Setiap objek dalam perjanjian bisa mencakup berbagai bentuk seperti produk fisik, layanan, atau bahkan kesepakatan untuk tidak melaksanakan suatu tindakan. Dalam konteks ini, objek perjanjian merupakan bentuk prestasi yang menjadi inti kesepakatan. Prestasi sendiri mengandung makna sebagai serangkaian tanggung jawab yang mengikat pihak debitur serta menjadi hak yang dimiliki pihak kreditur. Sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi memiliki beberapa komponen yang terdiri dari:

i. Memberikan sesuatu;

ii. Berbuat sesuatu; dan

iii.Tidak berbuat sesuatu.

1. Adanya Causa yang Halal (*Geoorloofde Oorzaak*).

Definisi mengenai orzaak (sebab yang diperbolehkan) tidak ditemukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Sementara itu, Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya memuat penjelasan tentang causa yang tidak diizinkan. Sebagaimana disampaikan Salim (2003:34), sebuah causa dinyatakan tidak diizinkan bila tidak sesuai dengan tiga aspek: peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma kesusilaan dalam masyarakat, serta ketentuan ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdata, sebuah kontrak atau perjanjian yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata akan menghasilkan konsekuensi hukum tertentu. Dalam hal ini, persyaratan awal dan berikutnya dikelompokkan sebagai syarat subjektif yang berkaitan dengan pihak-pihak pembuat perjanjian. Sementara itu, persyaratan nomor tiga dan empat masuk dalam kategori syarat objektif yang berhubungan dengan objek perjanjian. Ketika persyaratan pertama dan kedua tidak dipenuhi, status perjanjian tersebut berada dalam kondisi dapat dibatalkan. Hal ini membuka peluang bagi salah satu pihak untuk mengusulkan pembatalan perjanjian melalui Pengadilan, meskipun kesepakatan telah tercapai sebelumnya. Namun, bila semua pihak menyatakan tidak berkeberatan, status perjanjian akan tetap berlaku secara sah. Sebaliknya, bila persyaratan ketiga dan keempat tidak terlaksana, status perjanjian tersebut secara otomatis batal berdasarkan hukum. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terbentuk sejak awal (Salim,2003;35).

1. **Berlakunya Suatu Perjanjian.**

Sebuah perjanjian memiliki kekuatan mengikat hanya untuk pihak-pihak yang menciptakannya, tanpa memberikan dampak kepada pihak ketiga, terkecuali dalam situasi khusus yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang, seperti halnya dalam perjanjian yang melibatkan pihak ketiga (A Qiram;19). Ketentuan mengenai asas pemberlakuan perjanjian tercantum dalam Pasal 1315 KUHPerdata yang menyatakan bahwa seseorang tidak memiliki wewenang untuk membuat ikatan atas namanya sendiri maupun mengajukan penetapan perjanjian selain untuk kepentingan pribadinya.

Dalam suatu Perjanjian meliputi kegiatan (prestasi):

1. Menyerahkan sesuatu;
2. Melakukan sesuatu; dan
3. Tidak melakukan sesuatu.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang di lakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki akibat hukum atas hak dan kewajiban bagi para pembuatnya. Hak dan kewajiban tersebut didasarkan pada sebab tertentu yang membuat terjadinya kesepakatan kedua belah pihak atas semua syarat perjanjian. Hal ini terikat pada Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “*suatu sebab terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”*. Sehingga terdapat keterikatan yang tidak dapat dilepas karena didalam melakukan perjanjian dibutuhkan hukum untuk mengatur jalannya suatu perjanjian dengan baik antara hukum dan perjanjian.

Menurut Vollmar, dengan menganalisis isinya ternyata perikatan itu ada selama seorang itu (*debitur*) harus melakukan sesuatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur, kalau perlu dengan bantuan hakim. (Mariam Darus Badrulzaman,2001:1) Menurut C.Asser ciri utama perikatan adalah hubungan hukum antara para pihak, dimana dengan hubungan itu terdapat hak (prestasi) dan kewajiban (kontraprestasi) yang saling dipertukarkan oleh para pihak. (Asser,1991;5)

Dewasa ini perkembangan hukum kontrak/kerjasama atau hukum perjanjian didalam praktek telah semakin pesat, sehingga tidak lagi hanya berdasar pada ketentuan-ketentuan dalam Buku ke III KUHPerdata tentang perikatan. Perkembangan ini terjadi antara lain karena karena. Pasal 1338 KUHPerdata mengatur prinsip atau asas kebebasan berkontrak. (Bambang Sutiyoso,2016;42). Buku ke III KUHPerdata memiliki karakter atau sifat sebagai hukum pelengkap (*aanvullenrechts* atau *optional law*). Karakter yang demikian, orang boleh menggunakan atau tidak menggunakan ketentuan yang terdapat didalam buku ke III KUHPerdata tersebut.(Ridwan Khairandy,2015;16)

Asas *pacta sunt servanda,* merupakan salah satu norma dasar (*grundnorm, norm*) dalam hukum dan erat kaitannya dengan asas itikad baik untuk menghormati atau mentaati perjanjian, sejauh mana para pihak akan mentaati isi perjanjian yang terlihat dalam praktek pelaksanaannya. Aktualisasi pelaksanaan itikad baik dari satu janji antara lain dapat didefinisikan sebagai berikut: (Hanry Purwanto,2017;2)

1. Para pihak harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa, maksud, dan tujuan perjanjian itu sendiri;
2. Menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak maupun pihak ketiga yang mungkin diberikan hak dan/atau dibebani kewajiban (kalau ada);
3. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat usaha-usaha mencapai maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri, baik sebelum perjanjian itu mulai berlaku maupun setelah perjanjian itu mulai berlaku.

Nieuwenhuis, memberikan pendapat bahwa hukum perjanjian saling berkaitan satu dengan yang lain, yaitu adanya tiga asas perjanjian: (Henry Pangaean,2001;7)

1. Asas otonomi, yaitu adanya kewenangan mengadakan hubungan hukum yang mereka pilih (asas kemauan bebas);
2. Asas kepercayaan, yaitu adanya kepercayaan yang ditimbulkan dari perjanjian itu, yang perlu dilindungi (asas melindungi pihak beritikad baik); dan
3. Asas kausa, yaitu adanya saling ketergantungan (keterikatan) bagi suatu perjanjian untuk tunduk pada ketentuan hukum (*rechtsregel*) yang telah ada, walaupun ada kebebasan berkontrak.

Peter Mahmud Marzuki, menyebutnya harus ada *equitability.* (Peeter Mahmud,2009;9) *Contract* dengan unsur *justice* serta *fairness*, artinya harus menunjukkan suatu hubungan yang setara, tidak berat sebelah dan adil dimana hubungan kontraktual tersebut pada dasarnya berlangsung secara proposional dan wajar, yang menghendaki jaminan keseimbangan dan kepantasan menurut hukum.

Pada dasarnya asas proposionalitas tersebut merupakan perwujudan doktrin keadilan berkontrak yang mengoreksi dominasi asas kebebasan berkontrak yang dalam beberapa hal justru menimbulkan ketidakadilan. Perwujudan keadilan berkontrak ditentukan melalui dua pendekatan, *pertama;* pendekatan prosedural yang menitik beratkan pada persoalan kebebasan kehendak dalam suatu kontrak dan pendekatan substantif perlu diperhatikan adanya kepentingan yang berbeda: (Yusoof,2003;87)

1. Kontrak yang bersubstansi asas proposional adalah kontrak yang memberikan pengakuan terhadap hak, peluang dan kesempatan yang sama kepada para kontraktan untuk menentukan pertukaran yang adil. Kesamaan bukan dalam arti kesamaan hasil melainkan posisi para pihak yang mengandaikan kesetaraan kedudukan dan hak (*equitability*);
2. Berlandaskan pada kesamaan/ kesetaraan hak tersebut, maka kontrak yang bersubstansi asas proposional adalah kontrak yang dilandasi oleh kebebasan para kontraktan untuk menentukan substansi apa yang adil dan apa yang tidak adil bagi mereka (prinsip kebebasan);
3. Kontrak yang bersubstansi asas proposional adalah kontrak yang mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara proposional bagi para pihak. Prinsip distribusi-proposional terhadap hak dan kewajiban para pihak harus mengacu pertukaran yang fair;
4. Dalam hal terjadi sengketa kontrak, maka beban pembuktian, berat ringan kadar kesalahan maupun hal-hal lain terkait harus diukur berdasarkan asas proposionalitas untuk memperoleh hasil penyelesaian yang elegan dan *win-win solution.*

Kontrak tidak hanya mengikat pada apa yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga terhadap segala sesuatu yang menurut sifat kontrak, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

1. **Berakhirnya Perjanjian.**

Berakhirnya perjanjian pada umumnya adalah jika tujuan dari suatu perjanjian itu telah tercapai, dengan demikian isi perjanjian yang telah di buat bersama telah dilaksanakan dengan baik oleh para pihak. Di samping itu masih ada beberapa macam cara berakhirnya perjanjian, yaitu apabila (Subekti,2008;45)

1) Masa berlakunya perjanjian yang telah disepakati sudah terpenuhi;

2) Pada saat masa berlakunya perjanjian belum berakhir para pihak sepakat mengakhirinya;

3) Adanya penghentian oleh salah satu pihak dalam perjanjian dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku setempat;

4) Waktu berakhirnya suatu perjanjian ditentukan dengan batas waktu maksimal oleh Undang-undang;

5) Adanya putusan hakim karena adanya tuntutan pengakhiran perjanjian dari salah satu pihak;

6) Didalam Undang-undang atau perjanjian itu sendiri ditentukan bahwa dengan adanya suatu peristiwa tertentu maka perjanjian akan berakhir

* + - 1. **Tinjauan Tentang Utang Piutang**

Utang piutang merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang lazim terjadi dalam masyarakat. Hubungan ini melibatkan perjanjian antara dua pihak, yakni kreditur (pihak yang memberikan pinjaman) dan debitur (pihak yang menerima pinjaman). Dalam konteks hukum perdata, utang piutang diatur sebagai bagian dari perikatan yang dilahirkan berdasarkan kesepakatan atau undang-undang.

Prinsip utama dalam utang piutang adalah kepercayaan, di mana kreditur mempercayakan sejumlah uang atau barang kepada debitur dengan harapan debitur akan memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dalam bentuk yang sama atau dalam jumlah yang telah disepakati. Perjanjian utang piutang ini harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, meliputi kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Hubungan utang piutang dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti hubungan personal, transaksi komersial, atau pembiayaan yang melibatkan lembaga keuangan. Penyelesaian sengketa dalam utang piutang biasanya dilakukan melalui jalur musyawarah, mediasi, atau pengadilan, tergantung pada kesepakatan para pihak dan kompleksitas masalah yang muncul. (Manan,2004;5)

1. **Dasar Hukum** 
   * 1. Pasal 1233 KUHPerdata;"Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang."
     2. Pasal 1320 KUHPerdata: Menetapkan syarat sah perjanjian:

Kesepakatan para pihak.

Kecakapan untuk membuat perikatan.

Suatu Hal tertentu sebagai obyek

1. Suatu sebab yan halal.
   * 1. Pasal 1754 KUH Perdata: Definisi pinjam meminjam: “Suatu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak yang memberikan.”
2. **Jenis Utang Piutang**

Jenis-jenis utang dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai kategori seperti sumber, sifat, dan jangka waktu. Berikut adalah penjelasannya.(Muhamad,2010;12)

* + 1. Berdasarkan Sumbernya;

Perikatan yang bersumber dari perjanjian ( missal pinjaman uang, utang dagang )

Perikatan yang bersumber dari undang-undang ( misalnya kewajiban mengganti kerugian)

* + 1. Berdasarkan jangka waktu

1. Utang Jangka Pendek: Utang yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun, seperti utang usaha dan beban yang masih harus dibayar.
2. Utang Jangka Panjang: Utang dengan jangka waktu lebih dari satu tahun, seperti pinjaman hipotek atau obligasi.
   * 1. Berdasarkan Sifatnya
3. Utang Lancar (*Current Liabilities***)**: Utang yang harus dilunasi dalam waktu satu tahun, seperti utang usaha, utang pajak, dan utang dividen.
4. Utang Tidak Lancar (*Non-Current Liabilities***)**: Utang yang memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun, seperti pinjaman bank jangka panjang dan utang obligasi.

**3.Tinjauan Tentang Pembuktian**

a. Pengertian tentang Pembuktian

**Pembuktian** dalam hukum adalah proses untuk meyakinkan hakim atau pihak yang berwenang tentang kebenaran atau keabsahan suatu peristiwa, fakta, atau klaim yang dipermasalahkan dalam persidangan. Proses ini merupakan bagian penting dalam sistem peradilan untuk menegakkan keadilan.

**Menurut Pasal 1866 KUHPerdata:** Pembuktian mencakup alat-alat bukti yang sah, yaitu tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, dan lain-lain yang diatur dalam hukum. Pembuktian dalam hukum perdata adalah proses yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran fakta-fakta yang dikemukakan dalam persidangan. Tujuan utama pembuktian adalah untuk memberikan dasar yang sah bagi hakim dalam mengambil keputusan.(Sutan Remy Sjahdeini,2020;17).

* 1. Prinsip-prinsip Pembuktian.

Beban Pembuktian (onus Probandi); Beban pembuktian umumnya dibebankan kepada pihak yag mengajukan dalil atau gugatan ( Pasal 1865 KUHPerdata)

Prinsip Legalitas Alat Bukti: Hakim hanya dapat mempertimbangkan alat bukti yang diakui oleh undang-undang.

Keseimbangan Pembuktian; Hakim wajib memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak yang mengajukan bukti.(Abdulkadir Muhammad,2019;20)

* 1. Tujuan Pembuktian

Membuktikan kebenaran materiil (fakta yang sebenarnya terjadi)

Membuktikan kebenaran formil (fakta sesuai dokumen atau aturan hukum)

Melindungi hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perkara

* 1. Alat Bukti dalam Hukum Perdata;

Menurut Pasal 1866 KUHPer dan Pasal 164 HIR, alat bukti yang sah meliputi:

Surat: Dokumen atau akta tertulis yang relevan dengan perkara.

Saksi: Orang yang memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri.

Persangkaan: Kesimpulan yang diambil dari fakta yang telah terbukti.

1. Pengakuan: Pernyataan salah satu pihak yang mengakui fakta yang merugikan dirinya.
2. Sumpah: Pernyataan yang diucapkan dengan sumpah untuk meneguhkan kebenaran.
3. Peran Hakim dalam Pembuktian

Hakim dalam sistem hukum perdata memiliki peran aktif namun tetap harus bersikap netral. Hakim dapat memberikan penilaian bebas terhadap bukti-bukti yang diajukan, tetapi tetap harus mendasarkan putusannya pada fakta yang terbukti secara sah dan meyakinkan.(Sultan Remy Syahdeini,2020;19)

Dalam perkara perdata, peran hakim sangat penting, terutama dalam memastikan proses pembuktian berjalan sesuai dengan hukum acara. Peran hakim mencakup ; (Abdul Kadir Muhammad,2019;22)

Sebagai **Pengendali Proses Persidangan,** Hakim bertanggung jawab mengatur jalannya persidangan agar proses pembuktian berlangsung tertib dan sesuai hukum. Hakim juga memastikan para pihak diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti.

Menilai Kesesuaian alat bukti dengan Hukum.

Hakim menilai apakah alat bukti yang diajukan para pihak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang (misalnya, surat, saksi, sumpah, dan pengakuan).

Melakukan penilaian bbas terhadap bukti.

Hakim diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian bebas (freies ermessen) terhadap alat bukti, namun tetap dalam batas-batas peraturan hukum yang berlaku.

Menggali kebenaran Materiil dalam Pembuktian

Meskipun dalam perkara perdata lebih menekankan pada kebenaran formal, hakim tetap memiliki tanggung jawab untuk menemukan kebenaran materiil sejauh yang diizinkan hukum acara.

Memutuskan Berdasarkan Fakta yang Terukti.

Hakim harus mendasarkan putusannya pada fakta-fakta yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan.

Menyikapi alat bukti yang diragukan keabsahannya.

Hakim berwenang menilai alat bukti yang diragukan kebenarannya, seperti dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen atau keterangan palsu dari saksi.

* 1. **Landasan Teori**

Teori dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata *theoria.* Sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian, maka diperlukan landasaan teori sebagai pisau analisis. Menurut Fred N Kerlinger, teori adalah seperangkat kontruk (konsep), batasan dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variable dengan tujuaan untuk menjelaskan dan memprediksi gejala itu. (Salim,2016;6)

Landasan teoritis merupakan landasan berfikir yang bersumber dari suatu teori yang sering diperlukan sebagai tuntutan untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam sebuah penelitian. Begitu pula landasan teori berfungsi sebagai kerangka acuan yang dapat mengarahkan suatu penelitian. Menurut Radbruch, tugas teori hukum adalah untuk membuat jelas nilai-nilai hukum dan postulat-postulat hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam.(Friedman,1967;4) Sehingga teori tentang ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang sesuai dengan objek penelitian yang dijelaskan untuk mendapat verifikasi, maka harus didukung oleh data empiris yang membantu dalam mengungkapkan kebenaran. Fungsi teori mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan pengarahan kepada penelitian yang akan dilakukan. (Solly Lubis,1012;27) Teori juga berfungsi untuk memberikan petunjuk atas gejala-gejala yang timbul dalam penelitian dan desain penelitian serta langkah penelitian yang berhubungan dengan kepustakaan, isue kebijakan maupun nara sumber penting lainnya. (Robert K Yin,1993;17-23)

Adapun teori-teori yang dipergunakan untuk membedah permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

Teori Perjanjian.

Istilah perjanjian seringkali diartikan sama dengan kontrak. Hal ini dikarenakan pengertian perjanjian yang mengacu pada Buku III Bab Kedua KUHPerdata mengandung arti yang sama dengan kontrak. (Evi ariyani,2013;4) Pasal 1313 KUHPerdata mengartikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut pendapat Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu berjanji untuk melakukan sesuatu hal. (Subekti,2008;1)

Hukum kontrak di Indonesia diatur dalam Buku III Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Bab Kedua yang mengatur tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan. Pengertian kontrak dengan persetujuan adalah sama seperti terlihat yang didefinisikan pada pasal 1313 KUHPerdata. Hukum kontrak hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu.(Editon,2001;96) Sekalipun demikian mungkin kontrak adalah bagian yang kurang menonjol dari hukum yang hidup *(living law)* dibandingkan bidang lain yang berkembang berdasarkan hukum kontrak atau pemikiran tentang kontrak.

Teori-teori perjanjian atau teori kontak, terdapat beberapa macam istilah antara lain:

1. Teori Kepentingan *(UtilitarianismeTheory)* dari Jeremy Bentham.

Kebebasan berkontrak adalah refleksi dari perkembangan paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith. Adam Smith dengan teori ekonomi klasiknya mendasari pemikirannya pada ajaran hukum alam, hal yang sama menjadi dasar pemikiran Jeremy Bentham yang dikenal dengan *utilitarianisme*. Utilatarianism dan teori klasik ekonomi *laissez faire*, dianggap saling melengkapi dan sama-sama menghidupkan pemikiran liberlis individualistis.(Sutan remy Sjahdeini,1993;17)Jeremy Bentham dalam bukunya *“Introduction to the Morals and Legislation”* berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Menurut Teory Utilitis, tujuan hukum ialah menjamin adanya kebahagian sebesar-besarnya pada orang sebanyak-banyaknya. Kepastian melalui hukum bagi perseorangan merupakan tujuan utama dari pada hukum. (L.J Van,1981;168) Undang-undang adalah keputusan kehendak dari satu pihak; perjanjian, keputusan kehendak dari dua pihak; dengan kata lain, bahwa orang terikat pada perjanjian berdasar atas kehendaknya sendiri, pada undang-undang terlepas dari kehendaknya.

1. Teori-teori berdasarkan Prestasi Kedua Belah Pihak.

Teori-teori berdasarkan prestasi kedua belah pihak, dikemukakan oleh Roscoe Pound, sebagaimana yang dikutib Munir Fuady terdapat berbagai teori kontrak: (Munir Fuadi,2001;5-11)

1) Teori Hasrat *(Will Theory)*. Teori hasrat ini menekankan kepada pentingnya “hasrat” (*will* atau *intend*) dari pihak yang memberikan janji. Ukuran dari eksistensi, kekuatan berlaku dan substansi dari suatu kontrak diukur dari hasrat tersebut. Menurut teori ini yang terpenting dalam suatu kontrak bukan apa yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak tersebut, akan tetapi apa yang mereka inginkan.

2) Teori Tawar Menawar *(Bargaining Theory).* Teori ini merupakan perkembangan dari teori “sama nilai” (*equivalent theory*) dan sangat mendapat tempat dalam Negara-negara yang menganut system *Common Law*.  Teori sama nilai ini mengajarkan bahwa suatu kontrak hanya  mengikat sejauh apa yang dinegosiasikan (tawar menawar) dan kemudian disetujui oleh para pihak.

3) Teori sama nilai *(Equivalent Theory).* Teori ini mengajarkan bahwa suatu kontrak baru mengikat jika para pihak dalam kontrak tersebut memberikan prestasinya yang seimbang atau sama nilai *(equivalent)*.

4) Teori kepercayaan merugi *(Injurious Reliance Theory).* Teori ini mengajarkan bahwa kontrak sudah dianggap ada jika dengan kontrak yang bersangkutan sudah menimbulkan kepercayaan bagi pihak terhadap siapa janji itu diberikan sehingga pihak yang menerima janji tersebut karena kepercayaannya itu akan menimbulkan kerugian jika janji itu tidak terlaksana.

**c.** Teori-teori berdasarkan Formasi Kontrak.

Dalam ilmu hukum ada empat teori yang mendasar dalam teori formasi kontrak, yaitu:

* + - * 1. Teori kontrak *defacto.* Kontrak *de facto (implied in-fact)* adalah kontrak yang tidak pernah disebutkan  dengan tegas tetapi ada dalam kenyataan, pada prinsipnya dapat diterima sebagai kontrak yang sempurna;
        2. Teori kontrak *ekpresif.* Bahwa setiap kontrak yang dinyatakan dengan tegas (ekpresif) oleh para pihak baik dengan tertulis ataupun secara lisan, sejauh memenuhi syarat-syarat syahnya kontrak, dianggap sebagai ikatan yang sempurna bagi para pihak;
        3. Teori *promissory estoppel.* Disebut juga dengan detrimental reliance, dengan adanya persesuaian kehendak diantara pihak  jika pihak lawan telah melakukan sesuatu sebagai akibat dari tindakan-tindakan pihak lainnya yang dianggap merupakan tawaran untuk suatu ikatan kontrak;
        4. Teori kontrak *quas (pura-pura).* Disebut juga *quasi contract* atau *implied in law*, dalam hal tertentu apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu, maka hukum dapat dianggap adanya kontrak diantara para pihak dengan berbagai konsekwensinya, sungguhpun dalam kenyataannya kontrak tersebut tidak pernah ada. (salman,2009;45)

Perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya.(Mariam darus Badrulzaman,2005;11).Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat tercapai. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. (i Ketut Oka Setiawan,2106;42) Sri Soesdewi Masjchoen berpendapat bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.(Sri Soedewi masjchoen,1980;1) Setiawan berpendapat yang sama mengenai pengertian perjanjian tersebut.(Setiawan,1979;79) Tan Kamelo berpendapat yang sama bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk saling mengikatkan diri mengenai suatu obyek dengan tujuan tertentu dan mengakibatkan akibat hukum. (Tan Kamelo,2006;4)

Menurut Rutten, rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata mengandung beberapa kelemahan, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum. (Purwahid Patrik,2004;46).Dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik. (Purwahid Patrik.1994;3) Tirtodiningrat, memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang. (A.Qirom Meliala,1985;8).Dalam perjanjian tidak terdapat hubungan hukum yang timbul dengan sendirinya sehingga terhadap satu pihak diberi oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi, sedangkan satu pihak yang lain itupun menunaikan prestasi. Jadi satu pihak memperoleh hak dan pihak lain memikul kewajiban untuk menyerahkan atau menunaikan prestasi. Kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak memiliki makna kebebasan berkontrak yang positip dan negatif. (Nili Cohen,1995;26) Kebebasan berkontrak yang positip adalah bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk membuat kontrak yang mengikat yang mencerminkan kehendak bebas para pihak. Kontrak adalah hasil kehendak bebas para pihak. Dalam prinsip tersebut, maka pembentukan suatu kontrak dan pemilihan isi kontrak adalah hasil kehendak bebas para pihak. (Munir Fuadi,2001;5-11)

Kebebasan berkontrak negatif bermakna bahwa para pihak bebas dari suatu kewajiban sepanjang kontrak yang mengikat itu tidak mengaturnya. Sebagai konsekuensi adanya penekanan kebebasan berkontrak, maka kewajiban pada kontrak hanya dapat diciptakan oleh maksud atau kehendak para pihak. Gagasan utama kebebasan berkontrak berkaitan dengan penekanan akan persetujuan dan maksud atau kehendak para pihak. Selain itu gagasan kebebasan berkontrak juga berkaitan pandangan bahwa kontrak adalah hasil pilihan bebas sehingga tidak seorangpun terikat kepada kontrak sepanjang tidak dilakukan atas dasar adanya pilihan bebas untuk melakukan sesuatu.( Ricard Nisco,2004:29)

Teori kehendak, teori hukum kontrak klasik yang berasal dari prinsip *private outonomy*, kemudian bermakna bahwa kehendak para pihaklah yang menentukan hubungan hukum kontrak mereka. Prinsip yang demikian memiliki beberapa konsekuensi sebagai berikut:(Ridwan Khairani,2013:19)

Hubungan hukum yang berlaku bagi mereka tersebut semata-mata berkaitan

dengan maksud yang sebenarnya dari pihak yang berjanji;

* + 1. Maksud para pihak harus bertemu, pada saat sebelum dibuatnya kontrak;
    2. Hakim tidak memiliki kewenangan untuk mengisi celah dalam suatu kesepakatan dan tidak berdaya menghadapi kemungkinan hal yang tidak terduga;
    3. Pihak yang berjanji bebas mengungkapkan kemauannya.

Adanya konsensus para pihak, maka timbul kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang. Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. (Subekti,2005;128) Tidak hanya kewajiban moral, tetapi kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.

Penegasan mengenai adanya kebebasan berkontrak ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Prinsip bahwa kita terikat pada janji-janji dan kesanggupan kontraktual bukan saja harus dipenuhi secara moral tetapi juga secara hukum, dengan asumsi kita berada dalam suatu masyarakat yang beradab dan maju dengan peraturan yang berlaku.Didalam masyarakat seperti itu terdapat kebebasan untuk berpartisipasi maka untuk itu diperlukan suatu prinsip yaitu adanya kebebasan berkontrak yang merupakan suatu bagian dari hak-hak dan kebebasan-kebebasan manusia. Kontrak tersebut adalah lebih dari sekedar suatu janji, karena suatu janji tidak memberikan hak kepada pihak lain atas pelaksanaan janji itu.(Peter Aroma,1997;1)

John Stuart Mill menggunakan asas kebebasan berkontrak melalui dua asas. Asas umum pertama menyatakan bahwa hukum tidak boleh membatasi syarat-syarat yang boleh diperjanjikan oleh para pihak, artinya bahwa hukum tidak boleh membatasi apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang telah mengadakan perjanjian. Asas umum yang pertama ini menegaskan bahwa para pihak bebas untuk menentukan sendiri isi perjanjian yang akan dibuat. Asas umum kedua mengemukakan bahwa, pada umumnya seseorang menurut hukum tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian. Asas umum yang kedua ini menegaskan bahwa kebebasan berkontrak meliputi kebebasan bagi para pihak untuk menentukan dengan siapa dia berkeinginan membuat suatu perjanjian.

Menurut Subekti cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak (*beginsel der contractsvrijheid*) adalah dengan menekankan pada perkataan “semua” yang ada dimuka perkataan perjanjian. Dikatakan bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tersebut seolah-olah membuat suatu perjanjian bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa yang dinamakan ketertiban umum dan kesusilaan. (Subekti,2017;17)

Menurut Teori yang dikemukakan oleh Van Dunne yang dimaksud perjanjian adalah suatu hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. (Salim,2009;163) Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata memberikan definisi, semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata-kata berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya mengatakan bahwa perjanjian seperti itu mengikat para pihak dan karenanya para pihak harus memenuhi janji-janjinya. Sebagaimana undang-undang mengikat anggota masyarakat demikian juga perjanjian mengikat dan mengatur hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian. (Meiala,2007;27)

Premis sentral teori hukum kontrak adalah kebebasan berkontrak. Kebebasan otonomi individu *to be able make bargains as they saw fit* (dengan sedikit mungkin intervensi dari negara). Menurut pandangan teori klasik kontrak ini, para pihak yang membuat kontrak ini adalah *equal,* para pihak juga memiliki kemampuan menentukan *fair bargain* diantara mereka. Kontrak adalah produk yang dibuat para pihak (dengan kebebasan untuk menentukan), adanya otonomi kehendak yang luas dengan ide kebebasan berkontrak yang tidak terbatas.( K.M Sharma,1999;18)

Prinsip autonomy, yang bermakna bahwa kehendak para pihak yang menentukan hubungan hukum kontrak mereka, memiliki beberapa konsekuensi sebagai berikut:(John Swan, dan Barry J Reiter,1997;134)

1. Hukum yang berlaku bagi mereka tersebut semata-mata;
2. Maksud para pihak harus bertemu pada saat sebelum dibuatnya kontrak;
3. Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk mengisi celah dalam suatu kesepakatan dan tidak berdaya menghadapi kemungkinan hal yang tidak terduga;
4. Pihak yang berjanji bebas mengungkapkan kemauannya.

Pendapat lain dikemukankan Subekti, bahwa pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. (subekti,2008;45)Dari peristiwa itulah timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan/kontrak. Subekti dalam bukunya *Law in Indonesia* menyatakan bahwa, debitur yang telah melakukan tindakan yang berlawanan dengan kontrak itu dinyatakan menyalahi kontrak. Begitu pula apabila dalam kontrak ditentukan batas waktu pemenuhan kewajiban, akan tetapi debitur tidak mengindahkan limit waktu itu, jelas debitur dinyatakan bersalah. (Subekti,2014;25) Ketaatan untuk mematuhi isi perjanjian yang dibuat para pihak berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda* dalam penyelesaian isi kontrak, dilakukan dengan kesepakatan bersama.

Uraian diatas dapat diketahui bahwa di bawah pengaruh kebebasan berkontrak paradigma kebebasan berkontrak atau otonomi berkontrak dasarnya adalah kekuatan mengikat dan pelaksanaan kontrak

Teori Pembuktian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata „bukti‟ – terjemahan dari Bahasa Belanda, bewijs(Eddy O.S. Hiariej,2013;15) diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, bewijs diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.(Andi Hamzah,1986;83). Sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan. Pengertian bukti, membuktikan, dan pembuktian dalam konteks hukum tidak jauh berbeda dengan pengertian pada umumnya. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.(Sudirjo,1985;47) R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.(Subekti,2008;1)

Anshoruddin dengan mengutip beberapa pendapat mengartikan pembuktian sebagai berikut:. Menurut Muhammad at Thohir Muhammad „Abd al Aziz‟, membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan orang lain. Menurut Sobhi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Artinya, hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.(Anshoruddin,2004;25) Menurut Sudikno Mertokusumo.(Sudikno Mertokusumo,2006;134), mengandung beberapa pengertian yaitu:

* + - * 1. Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah berarti memberikan kepastian mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan
        2. Membuktikan dalam arti konvensionil berarti memberikan kepastian yang nisbi atau relative sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:

1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat instuitif (*conviction intime*)

* + 1. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal *(conviction raisonnee)*

c. Membuktikan dalam arti yuridis berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Secara singkat, Subekti berpendapat bahwa pembuktian memiliki arti penting atau hanya diperlukan jika terjadi persengketaan atau perkara di pengadilan. Arti penting pembuktian yang dikemukakan Sudikno dan Subekti lebih bersifat universal, baik dalam konteks perkara pidana maupun perdata. Beberapa definisi perihal bukti, membuktikan, dan pembuktian, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bukti merujuk pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara itu, pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di pengadilan

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undangundang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa.

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu:

* 1. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*)

Teori ini dikatakan „secara positif‟, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu, artinya jika sesuatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Jadi sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheori*) (Andi Sofyan,2013;233). Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang

secara positif (positief wettelijk) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (inquisitoir) dalam acara pidana. Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang. Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagipula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.(Wiryono Projodikoro)

* 1. Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim melulu (*conviction intime*) Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Melalui sistem “*Conviction Intime*”, kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka sehingga hakim tidak terikat pada suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim dapat terasa nuansa subjektifnya. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri. Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakian hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Sistem ini memberi kebebasan hakim yang terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.
  2. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa, tetapi penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan dengan selektif dalam arti keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan jelas dan rasional dalam mengambil keputusan. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (vrije bewijstheorie).

* 1. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijke bewijs theorie) Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Jadi, untuk menarik kesimpulan dari kegiatan pembuktian didasarkan pada 2 (dua) hal, ialah alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan yang tidak berdiri sendiri-sendiri. Dari aspek historis ternyata sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative merupakan peramuan antara sistem pembuktian menurut undang-undang positif (*positief wettelijke bewijs theorie*) dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*). Dengan peramuan ini, substansi sistem pembuktian menurut undangundang secara negative (*negatief wettelijke bewijs theorie*) tentulah melekat adanya anasir (Lilik Mulyadi,2008,10)

1) Prosedural dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limitative ditentukan undang-undang; dan

2) Terhadap alat-alat bukti tersebut hakim baik secara materiil maupun secara procedural.

3. Teori Kepastian Hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo (2006: 136) Kepastian Hukum adalah “*Sicherkeit des Rechts selbts*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum:

* 1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*);
  2. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”;
  3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan;
  4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Menurut Frans Magnis Suseno (1993: 79) memberikan arti kepastian sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian dapat pula mengandung arti yakni:

*Pertama*: adanya kejelasan;

*Kedua*: tidak menimbulkan multi tafsir atau keraguan;

*Ketiga*: tidak menimbulkan kontradiktif;

Keempat: dapat dilaksanakan.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dalam hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Adanya keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, karena dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupannya bermasyarakat. Untuk sampai pada kepastian maka hukum harus mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas sesuatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan hukum yang lain tidak boleh kontradiktif, karena bila demikian justru menjadi sumber keraguan. Apabila sampai terjadi kontradiktif, maka pertentangan demikian harus secepatnya diakhiri melalui perangkat sistem hukum itu sendiri.

Kepastian hukum merupakan salah satu hal yang paling sering dipersoalkan. Kepastian hukum dapat diartikan berlakunya hukum secara tegas dalam masyarakat. Karena untuk dapat memahami secara jelas tentang kepastian hukum, maka perlu diuraikan juga pengertian kepastian hukum oleh para ahli dibawah ini: Menurut Radbruch (1961: 36) memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum. Ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum.

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah peraturan perundang-undangan.

*Kedua*, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri, seperti melalui klausul umum “kesopanan” *dan“kemauan baik”.*

*Ketiga*, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.

*Keempat,* hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Apa yang dikatakan oleh Gustav Radbruch (1961: 36) diatas didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum, maka datanglah kepastian. Selanjutnya Radbruch menyatakan untuk kepastian hukum harus dijaga demi keteraturan/ketertiban suatu negara, oleh karenanya hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif itu kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum. Jaminan ditaatinya hukum dalam masyarakat merupakan hal yang harus diwujudkan. Negara memiliki sarana yang memadai dan efektif untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada. Dengan demikian akan melahirkan kepastian hukum yang sesuai dengan yang diinginkan oleh semua pihak.

Sementara itu, menurut Van Apeldoorn (1990: 24-25) berpendapat bahwa kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensikonsekuensi hukumnya. Kepastian hukum juga bearti hal yang dapat ditentukan dari hukum, dalam hal-hal yang konkret. Pendapat Van Apeldoorn tersebut dapat dimaknai bahwa hukum harus mempunyai kejelasan sehinggadapat mengikat masyarakat. Kepastian hukum sangat berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut Van Apeldoorn kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu: *Pertama*, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret, artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum memulai suatu perkara.

*Kedua,* kepastian hukum bearti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kewenangan hakim.

Berdasarkan teori tersebut, dapat diberikan pendapat bahwa yang disampaikan oleh Frans Magnis Suseno (1993: 79) dapat menjelaskan mengenai arti tentang kepastian hukum yaitu sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Kepastian dapat pula mengandung arti yakni: pertama, adanya kejelasan; kedua, tidak menimbulkan multi tafsir atau keraguan; ketiga, tidak menimbulkan kontradiktif; keempat, dapat dilaksanakan. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dalam hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.